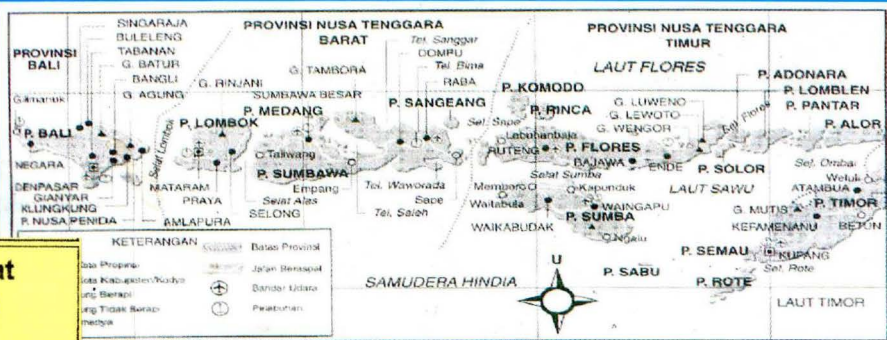


NIPK 69

# SEWINDU BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL BALI, NTB, DAN NTT TAHUN 1996 - 2004



Direktorat  
udayaan

MENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
DENPASAR  
2004

Sewindu Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional  
Bali, NTB, dan NTT Tahun 1996 – 2004

HADIAH 15-12-2004  
BKSNT DENPASAR  
U/ PERPUSTAKAAN  
ASDEP UR. TRADISI

Oleh  
Drs. I Made Purna, M.Si.  
Dra. Cok Istri Suryawati  
Nuryahman, S.S.  
Sumarja, S.S.  
Hartono, S.S.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata  
Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar  
2004

Hak Cipta 2004, pada BKSNT Denpasar

---

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun,  
termasuk dengan cara penggunaan foto copy, tanpa izin sah dari penerbit.

---

Cetakan pertama, Agustus 2004

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar  
Jln. Raya Dalung – Abianbase No. 107, Dalung,  
Kuta Utara, Bali 80361  
Telp. (0361) 243690  
Fax. (0361) 410112

**KEPALA BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
DENPASAR**



**Dra. S. Swarsi**  
1996-2001



**Drs. I Made Purna, M.Si.**  
2002 – Sekarang

**Foto Bersama Kepala dan Staf**  
**Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali, NTB, dan NTT**





## GUBERNUR BALI

---

### SAMBUTAN GUBERNUR BALI

Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang terbangun dari keragaman etnis, agama, budaya dengan kekayaan pondasi-pondasi sejarah yang terbalut dengan warisan nilai-nilai tradisional sebagai tatanan nilai-nilai. Nilai-nilai ini amat konstruktif sebagai modal membangun bangsa (character building).

Indonesia sebagai bangsa yang plural memerlukan penguatan penggalian dan pelestarian sejarah sebagai usaha memperkuat integritas, jati diri untuk menjadikan pribadi manusianya yang bermartabat.

Dalam perjalanan jaman beberapa kepulauan dan sebagainya Sunda Kecil yang meliputi Provinsi Bali, NTB, NTT mempunyai potensi besar yakni sejarah, nilai tradisional sehingga keberadaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional amat strategis.

Saya sebagai Kepala Daerah menyambut baik upaya penerbitan “Sewindu” Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali, NTB, NTT tahun 1996 – 2004 semoga hal ini dapat menumbuhkan karifan lokal dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dari gesekan modernisasi sehingga pembangunan yang berwawasan budaya tidak hanya retorika politik.

Akhir kata saya ucapkan selamat atas kerja sama semua pihak dalam rangka menyambut HUT ke-8 Lembaga Kajian Sejarah, semoga bermanfaat.

Denpasar, 27 September 2004  
Gubernur Propinsi Bali,

**Dewa Beratha**

## **SAMBUTAN DEPUTI BIDANG PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Mewujudkan sebuah cita-cita yang luhur yaitu menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera bagi sebuah bangsa yang multi etnik dengan wilayah yang luas serta beragam kebudayaan tidaklah mudah. Semuanya harus melalui perjuangan yang panjang, modal yang besar dan senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh seta kebersamaan. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar didirikan merupakan salah satu usaha untuk melaksanakan usaha mewujudkan cita-cita tersebut.

Indonesia merupakan sebuah masyarakat bangsa yang terdiri atas ratusan etnik dengan kekayaan budaya yang beragam. Dengan cita-cita yang sama maka tepatlah semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Penekanan makna “keragaman” dan “kesatuan” memang seharusnya dalam tarikan nafas yang berimbang. Apalagi di era reformasi sekarang ini sedang maraknya berbabagai isu yang mengarah kepada disintegrasi bangsa sebagai dampak negatif dari penerapan otonomi daerah. Lebih dari lima tahun reformasi digulirkan sudah kita lalui. Itu sudah merupakan satu episode yang banyak mencatat peristiwa sejarah. Periode ini telah memberi banyak bahan bagi upaya untuk memetakan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia baik dalam konteks nasional, lokal, regional dan global. Pengalaman lebih dari lima tahun ini penting sebagai bahan kajian dan perumusan kebijakan pembangunan bangsa terutama dalam bidang kebudayaan dan khususnya sejarah perjalanan bangsa. Oleh sebab itu maka perlu didorong munculnya segi-segi positif dalam kerangka otonomi daerah melalui kajian sejarah maupun nilai-nilai budaya lain yang ada di daerah. Salah satu usaha itu telah dilakukan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar selama kurun waktu sewindu atau delapan tahun. Mengingat arti pentingnya kajian tersebut maka saya mendorong dan menyambut gembira atas terbitnya *Sewindu Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar Tahun 1996-2004*, yang ditulis oleh para penulis Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar.

Ada beberapa harapan dengan terbitnya buku ini, pertama masyarakat luas akan dapat membacanya, memahami dan mengenal keberadaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar yang mempunyai cakupan wilayah kerja Bali, NTB dan NTT. Kedua, dengan terbitnya buku ini merupakan sarana sosialisasi tugas pokok dan fungsi Balai Kajian sekaligus pertanggung jawaban sebuah instansi pemerintah kepada masyarakat luas. Usia sewindu memang masih terlalu muda tentu saja masih banyak tugas dan tantangan yang dihadapi di masa yang akan datang. Untuk itu perlu dipersiapkan program-program kerja mantap dan strategis ke depan.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat dan terima kasih atas penerbitan buku ini kepada para penulis dan seluruh staf Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar serta semua pihak yang turut membantu penerbitan ini. Semoga buku ini bisa memberi manfaat kepada semua yang membacanya.

Jakarta, Agustus 2004



**Dr. Meutia F. Suasono**



## PENGANTAR KEPALA BALAI

*Om Swastyastu*

Puji syukur dipanjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar berhasil menerbitkan *Sewindu Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali, NTB, dan NTT Tahun 1996-2004* berkaitan dengan Ulang Tahun ke-8.

Penerbitan ini merupakan salah satu upaya untuk lebih memperkenalkan secara menyeluruh keberadaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar kepada masyarakat luas. Selama 8 tahun sejak berdirinya Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar telah berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk menginventarisasi, mendokumentasi, mengkaji, menganalisis sekaligus menginformasikan hal-hal mengenai kesejarahan dan kenilaitradisional di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Kami menyadari bahwa berhasilnya usaha ini selain kerja keras seluruh jajaran Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bali, NTB, dan NTT, juga berkat kerjasama yang baik dari semua pihak terutama Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, kecamatan, desa dan semua unsur masyarakat di wilayah Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kerjasama tersebut senantiasa masih kami harapkan untuk masa akan datang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan kerjasamanya. Selanjutnya kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi penyempurnaan penerbitan ini

*Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.*

Denpasar, Agustus 2004  
Kepala Balai Kajian Sejarah  
dan Nilai Tradisional Denpasar,



**Drs. I Made Purna, M. Si**  
NIP131754561

## DAFTAR ISI

Personalia .....	i
Sambutan Gubernur Daerah Propinsi Bali .....	v
Sambutan Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan .....	vi
Pengantar Kepala Balai .....	viii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>BAB II BALAI KAJIAN SEJARAH NILAI TRADISIONAL DENPASAR</b> .....	8
2.1 Sejarah Berdirinya .....	8
2.2 Lokasi .....	10
2.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....	10
2.4 Wilayah Kerja .....	13
<b>BAB III PERKEMBANGAN BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL DENPASAR</b> .....	18
3.1 Induk yang Selalu Berubah .....	18
3.2 Struktur Organisasi .....	23
3.3 Berpisah dengan Saudaranya .....	40
3.4 Sumber Daya Manusia .....	43
3.5 Sarana dan Prasarana .....	63
3.5.1 Pengadaan Tanah .....	63
3.5.2 Pengadaan Kantor .....	64
3.5.3 Inventaris Kantor .....	65
3.5.4 Perpustakaan .....	67
<b>BAB IV SEWINDU BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL DENPASAR</b> .....	71
4.1 Hasil Karya .....	71
a. Kajian Rutin .....	71
b. Kajian Pembangunan .....	75
c. Kajian Kerjasama .....	77
4.2 Kegiatan .....	77
a. Pertemuan Ilmiah .....	77
b. Lomba .....	79

4.3	Perencanaan .....	80
4.3.1	Visi dan Misi .....	80
a.	Visi .....	80
b.	Misi .....	81
4.3.2	Strategi yang Ditempuh .....	83
4.3.3	Sarana dan Prasarana ke Depan .....	84
4.3.4	Rencana Strategis .....	84
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>86</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	.....	<b>88</b>

## BAB I PENDAHULUAN

Wilayah Indonesia merupakan kepulauan yang tersebar di sekitar katulistiwa dengan jumlah diperkirakan sekitar 17.000-an pulau lebih. Deretan pulau-pulau tersebut dihubungkan dengan perairan yang terletak di antara dan sekitar pulau dengan sebutan laut Nusantara. Pulau-pulau yang ada baik besar maupun kecil merupakan satu kesatuan integritas Negara Republik Indonesia. Penduduk yang mendiami pulau tersebut terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan latar belakang budaya yang beraneka ragam. Masing-masing kelompok suku bangsa relatif menempati ruang pemukiman dengan kondisi alam yang berbeda antara satu dengan lainnya.

Keberagaman budaya Indonesia ditunjukkan pula oleh banyaknya kategori-kategori sosial dalam masyarakat yang dapat dianggap memiliki simbol-simbol jati diri yang diaktifkan dan digunakan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kategori kemasyarakatan dengan ciri-ciri jati diri yang batas-batasnya bersifat cair tersebut dalam kerangka nasionalisme (kebangsaan) yang lazim disebut suku bangsa. Berbagai kajian tentang masyarakat Indonesia membuktikan bahwa bangsa ini terbentuk dari ratusan suku bangsa (paroh bangsa/bagian bangsa) yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Dalam buku *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia* misalnya mencatat lebih dari 550 suku bangsa.<sup>1</sup> Masing-masing suku bangsa menjadi eksis karena adanya pengakuan diri berupa kesepakatan komunal, pengakuan dari suku bangsa lain di sekitarnya. Dasar pengakuan tersebut umumnya mengacu kepada kekhasan bahasa, adat istiadat dan unsur kebudayaan tertentu yang membedakan satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya.

Keberagaman kebudayaan dapat menjadi modal pembangunan masa depan bagi negara besar dan majemuk seperti Indonesia ini. Konflik sosial maupun politik dapat dihindari dan ditekan apabila masyarakat siap menerima berbagai perbedaan sosial yang ada. Perbedaan sosial dapat dikembangkan menjadi kesatuan melalui saling percaya (*mutual trust*), saling menghargai eksistensi (*existense honorafie*) dan saling melakukan pertukaran sosial (*social*

---

<sup>1</sup> Zulyani Hidayah. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. (Jakarta : LP3ES, 1977).

*exchange*). Untuk itu pada saat sekarang sudah saatnya masyarakat Indonesia yang majemuk ini mengembangkan etika sosial (*social ethic*) secara nasional.<sup>2</sup> Disamping itu pula dikembangkannya suatu kebudayaan Nasional Indonesia. Kebutuhan akan kebudayaan nasional, sebagai kerangka acuan dalam bermasyarakat dan berbangsa secara nasional itu telah disadari sepenuhnya oleh para pendiri negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercermin dalam amanat UUD 1945. Secara khusus pasal 32 mengamanatkan “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Akan tetapi, karena besarnya semangat kebangsaan pada awal kemerdekaan, pengembangan kebudayaan nasional itu diselenggarakan dengan mengabaikan keberadaan dan fungsi kebudayaan-kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia yang majemuk. Kekhilafan itulah yang kemudian menimbulkan berbagai masalah konflik sosial, politik dan ekonomi serta keamanan dalam pembangunan bangsa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mendapatkan pengakuan kesetaraan dalam pergaulan internasional.<sup>3</sup>

Ketika reformasi bergulir tahun 1998, berbagai persoalan bangsa ini hanya sedikit yang diangkat ke dalam wacana kebudayaan, karena jarangnyanya maka daya ungkap dan pemecahan secara kebudayaan cenderung diabaikan. Berbagai upaya melalui wacana kebudayaan sering dikatakan oleh para budayawan maupun kalangan akademik, akan tetapi masukan dan laporan mereka jarang sekali diakui sebagai dasar pembuatan kebijakan pemerintah. Persoalan bangsa kita yang sangat kompleks ini lebih banyak dilihat orang dari sudut politik, ekonomi, hukum, dan keamanan. Pendekatan kebudayaan dianggap terlalu konseptis dan tidak mampu memberikan jawaban nyata bagi persoalan aktual. Reformasi telah berjalan hampir enam tahun (1998-2004) berbagai persoalan bangsa justru semakin banyak bermunculan di era ini. Pelaksanaan UU Otonomi Daerah yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 telah memberikan keleluasaan daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memperkecil kesenjangan kesejahteraan umum antar daerah maupun intra daerah.

---

<sup>2</sup> Zulyani Hidayah. “Keberagaman Budaya sebagai Pemersatu Bangsa” artikel *Majalah Ragam Budaya, Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan*, Tahun ke I –2001.

<sup>3</sup> Budhi Santosa. “*Kemajemukan Masyarakat dan Keanekaragaman Kebudayaan Dalam Pembangunan Bangsa*”. Jnana Budaya No.05/V/2001.

Keleluasaan daerah untuk mengelola potensi sumberdaya dan mendistribusikannya demi kesejahteraan umum, memerlukan pengendalian sosial yang menuntun pemberdayaan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai budayanya masing-masing.

Di masa mendatang pendekatan kebudayaan sekiranya perlu diperhatikan dalam menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi di negeri ini seperti konflik sosial, keamanan dan lain sebagainya. Amandemen UUD 1945 pada pasal 32 ayat 1 telah mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dalam penjelasannya diuraikan pula bahwa kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Agar usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa tidak kehilangan jati diri dan kepribadian bangsa, maka diperlukan juga suatu ketahanan budaya yang berfungsi sebagai pengawas dan penyeleksi unsur-unsur budaya asing yang akan diambil alih ke dalam kebudayaan bangsa.

Bangsa Indonesia mempunyai kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka, wilayah luas dan letak yang strategis secara komparatif kekayaan alam yang beraneka ragam, penduduk dengan jumlah yang besar, acuan rohaniah berupa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, azas kebangsaan yang dikenal sebagai Pancasila, kebudayaan nasional yang meliputi beraneka ragam kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah, potensi dan kekuatan efektif bangsa, serta pranata keamanan dan pertahanan nasional.

Kebudayaan nasional itu muncul sebagai sistem budaya baru karena tumbuhnya sosok nilai-nilai yang menjadi acuan hak dan kewajiban kolektiva multi etnik yang memerdekakan diri menjadi bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan kehidupan berkebangsaan tersebut, maka dikembangkan pula

sistem budaya baru yang dapat diterima dan mempersatukan seluruh warga negara. Dalam budaya nasional ini, nilai-nilai, pikiran-pikiran dan lambang baru tidak lagi mengacu kepada budaya (daerah atau suku bangsa) asal sendiri-sendiri melainkan sistem budaya nasional yang menjadi unsur persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Jati diri dan kepribadian bangsa merupakan kesadaran akan sifat khas bangsa Indonesia yang menjadi ciri-ciri watak yang menonjol dan tampak ada berbagai budaya dan menjadi satu kesatuan nasional. Dikembangkan pula wawasan budaya Nusantara yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Dengan mempunyai tekad bersama untuk kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu, cinta tanah air, bangsa dan bahasa, demokrasi, kesetiakawanan sosial dengan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan bangsa di tengah pergaulan bangsa di seluruh dunia pada era globalisasi ini.

Nilai tradisional merupakan salah satu di antara unsur kebudayaan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia. Kesejarahan adalah nilai-nilai yang terkandung dalam pemikiran para tokoh dan berbagai peristiwa dalam benda bergerak dan tidak bergerak yang terjadi di masa lalu yang direkonstruksi untuk kepentingan masa kini dan masa depan. Nilai-nilai tradisional yang sebenarnya juga nilai-nilai di masa lalu yang diproduksi dan ditransformasi untuk kepentingan masa kini dan masa depan. Perkembangan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari proses reproduksi dan transformasi nilai-nilai di masa lalu, masa kini, dan masa depan yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman.

Memahami kenyataan dan arti pentingnya kebudayaan maka pemerintah bersama masyarakat berupaya memelihara dan melestarikan budaya bangsa agar tidak punah. Memajukan dan mengembangkan kebudayaan bangsa serta menciptakan iklim agar keduanya dapat berjalan terpadu melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan kebudayaan. Pembinaan dilakukan dengan meningkatkan mutu dan mempersiapkan masyarakat sebagai pendukung kebudayaan yang tanggap, tangguh, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan sama dengan upaya menanamkan dan mengukuhkan nilai-nilai budaya, pemikiran, gagasan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Pengembangan ditujukan untuk mempertinggi mutu kebudayaan bangsa, memperkaya nilai-nilai dan memperkuat identitas budaya bangsa sesuai

dengan yang diamanatkan dalam pasal 32 UUD 1945. Untuk mendukung hal tersebut maka perlu secara terus menerus dilakukan berbagai kajian dan penelitian. Di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional daerah dilakukan oleh suatu Unit Pelaksana Teknis, yaitu Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional yang ada di sebelas propinsi di seluruh Indonesia

Berdirinya Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional adalah salah satu upaya untuk menjawab berbagai permasalahan kebudayaan khususnya Sejarah dan Nilai Tradisional yang sampai saat ini masih banyak yang belum terungkap dan perlu dikaji sehingga memerlukan kajian dan penelitian secara terus menerus.

Berbagai permasalahan kesejarahan dan kenilaitradisional yang ada di Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur serta wilayah perbatasan dengan Timor-Timur belum dapat dikaji sepenuhnya secara optimal. Bali sebagai pusat kebudayaan dan pariwisata di Indonesia mempunyai potensi dalam pengembangan kebudayaan serta menarik sebagai pusat kajian sejarah dan nilai tradisional. Di samping keadaan geografis pulau Bali yang banyak menampilkan panorama alam yang indah dan ideal berupa gunung-gunung, danau, lembah, sawah yang membentang berteras-teras dan pantai laut yang mengitarinya, Bali juga memiliki berbagai keunikan budaya mulai dari upacara-upacara tradisional, tata kemasyarakatan dan berbagai jenis kesenian yang bermutu tinggi. Peninggalan sejarah dan purbakala juga banyak ada dan tersebar di beberapa tempat mulai dari jaman palaeolithicum sampai pada jaman pertengahan. Sumber-sumber sejarah berupa "babad" juga banyak tersimpan secara rapi di Gedong Kirtya Singaraja. Peristiwa sejarah berupa perlawanan terhadap Belanda juga tercatat di Bali dengan ciri khasnya "puputan", antara lain Perang Jagaraga, Perang Kusamba tahun 1849, Puputan Badung tahun 1906, Puputan Klungkung tahun 1908. Pada masa mempertahankan kemerdekaan atau revolusi fisik juga terjadi "Puputan Margarana" pada tahun 1946 dengan gugurnya I Gusti Ngurah Rai beserta seluruh anggota pasukannya. Kesemuanya itu merupakan kekhasan dari kebudayaan Bali secara menyeluruh yang dalam kehidupan sehari-sehari selalu disinari oleh ajaran agama Hindu. Karena itu, tidak mengherankan aspek yang menjadi ciri khas kajian di BKSNT Denpasar adalah persebaran dan perkembangan kebudayaan Hindu dan pariwisata.



Selain Bali, terasa menarik untuk lebih mengkaji dan memahami Nusa Tenggara dari segi sejarahnya sebab bagaimana munculnya Nusa Tenggara seperti sekarang ini belum banyak diketahui. Meskipun gugusan pulau ini tidak dapat dipandang sebagai dunia yang bulat, namun kesatuan Nusa Tenggara telah muncul ke permukaan. Apapun asalnya semua ini tampak penting artinya untuk dimengerti perkembangan yang sedang terjadi sekarang ini. Dalam konteks ini studi sejarah mengenai keseluruhan pulau ini juga membawa manfaat sesungguhnya Bali sebelumnya juga termasuk dalam lingkungan ini, yaitu Sunda Ketjil yang sekarang telah menjadi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Keterlibatan Nusa Tenggara dalam pergaulan dunia khususnya perdagangan adalah sudah sejak lama bahkan sebelum kedatangan bangsa Eropa.<sup>4</sup> Nusa Tenggara sebagai sebuah gugusan kepulauan di bagian timur Indonesia (sebelumnya Hindia-Belanda) adalah satu lingkungan yang secara formal dibentuk kemudian oleh kepentingan politik pihak atas (sebelumnya Hindia-Belanda) kemudian Republik Indonesia. Dari segi penduduk wilayah ini dihuni oleh berbagai kelompok suku bangsa, dari segi kebudayaan dan bahasa juga menampakkan perbedaan sehingga banyak sekali nilai –nilai tradisional yang perlu mendapat perhatian dan kajian secara lebih mendalam.

Dilihat dari segi sejarah, jauh sebelum abad ke-19 kelompok penduduk di Nusa Tenggara baik barat maupun timur sesungguhnya telah membina hubungan dengan kekuatan-kekuatan di luarnya, baik dalam bidang politik maupun perdagangan. Hal itu terutama nampak pada kerajaan-kerajaan di Lombok (hubungan dengan Bali), Sumbawa-Bima (dengan Gowa-Makasar), dan lingkungan Timor (khususnya Solor pernah terkait dengan Maluku-Ternate).<sup>5</sup> Hubungan-hubungan tersebut terus berlanjut hingga sampai abad ke-19 ketika kedatangan bangsa Eropa terutama Portugis dan Belanda yang saling berebut di wilayah Timor, juga jalinan dengan para pedagang dari Cina, Arab, dan Jawa.

Semua hal tersebut, baik yang berkaitan dengan kebudayaan khususnya kesejarahan dan kenilatradsionalan perlu mendapat perhatian dan pengkajian yang lebih mendalam, dan ini menjadi tugas pokok, tanggung jawab dan fungsi dari Balai Kajian Sejarah dan Nilai tradisional Denpasar. Hasil kajian kesejarahan dan kenilai-tradsionalan di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

---

<sup>4</sup> Baca: I Gde Parimartha, *Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815-1915*. (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 4-5.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 398.

Tenggara Timur akan disebarluaskan kepada masyarakat, sehingga akan menambah pengetahuan, pemahaman mengenai berbagai kebudayaan dan mempercepat pengenalan kebudayaan antar suku bangsa yang ada di Indonesia, akhirnya akan memperkokoh integrasi bangsa.

Sebagai salah satu upaya untuk lebih memperkenalkan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar kepada seluruh lapisan masyarakat maka disusunlah buku ini. Dalam buku ini diungkapkan tentang keberadaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar mulai dari awal pembentukan, Tugas Pokok dan Fungsinya, Wilayah Kerja, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, hasil-hasil yang dicapai beserta kegiatannya, Rencana Strategis (Renstra) ke depan selain itu juga berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi.

## **BAB II**

# **BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL DENPASAR**

### **2.1 Sejarah Berdirinya**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dibentuknya Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional didasarkan pada kebijakan bahwa masyarakat dan kebudayaan Indonesia itu beraneka ragam. Kebudayaan yang beraneka ragam tersebut perlu dilestarikan dan selanjutnya perlu dikaji secara terus menerus dan mendalam. Seperti diketahui bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk yang tersebar diberbagai daerah dimana tiap-tiap daerah memiliki kebudayaan dan kekhasan sendiri. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan maka akan terjadi berbagai perubahan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga pemerintah perlu mendirikan suatu lembaga pengkajian yaitu Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Pada setiap propinsi yang berdiri lembaga ini maka Balai itu akan mengutamakan pengkajian dan pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang sesuai dengan lingkungan kebudayaan yang timbul dan berkembang di daerah bersangkutan.

Bali sendiri seperti yang telah diungkapkan dalam pendahuluan sebagai daerah yang memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi terutama kaitannya dengan kepercayaan masyarakat Bali yaitu agama Hindu. Tidak mengherankan bila pulau Bali terkenal dengan sebutan “Pulau Dewata”, “Pulau Seribu Pura”, “ Gudangnya Seni dan Budaya” dan masih banyak lagi sebutan atau julukan lainnya. Kecuali itu banyak terdapat peninggalan sejarah dan obyek wisata disamping tradisi kuat yang terkait dengan ajaran agama Hindu, hal tersebut rutin dilaksanakan masyarakat Bali juga daya tarik pariwisatanya. Sehubungan dengan hal itu maka berkaitan dengan obyek pengkajian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar akan lebih memfokuskan perhatian dalam pelayanan informasi kebudayaan dan kesejarahan yang berkaitan dengan keberadaan Bali beserta budayanya, disamping dampak pariwisata terhadap kehidupan masyarakat setempat. Disamping Bali juga wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari pulau-pulau, wilayah kelautan (maritim), beraneka budaya, bahasa, suku bangsa dan latar belakang sejarahnya.

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar berdiri dengan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0303/0/1995, tanggal 4 Oktober 1995. Setelah selesai pembangunan gedungnya kemudian diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro pada tanggal 7 Nopember 1996.<sup>6</sup> Balai Kajian ini didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam melestarikan keanekaragaman kebudayaan suku bangsa Indonesia khususnya daerah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, selanjutnya untuk pengembangan kebudayaan nasional Indonesia.

## 2.2 Lokasi

Kantor Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar terletak di desa Dalung atau tepatnya Jalan Raya Dalung – Abianbase No. 107 Denpasar Bali. Desa Dalung merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Desa Dalung memiliki luas sekitar 615.000 ha dan merupakan daerah dataran (bukan pantai) dengan ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Secara administrasi, Desa Dalung berbatasan dengan :

- a. Sebelah barat berbatasan desa Buduk
- b. Sebelah Timur berbatasan desa Sempidi
- c. Sebelah selatan berbatasan desa Kerobokan
- d. Sebelah utara berbatasan desa Kapal

Menurut catatan Kantor Desa Dalung, tanah seluas 615.000 ha tersebut sebagian besar digunakan untuk usaha pertanian (sawah) yaitu 391.827 ha. Kemudian 131.801 ha digunakan untuk perumahan, pertokoan dan pekarangan, lalu seluas 32.400 ha untuk tanah bangunan umum seperti kantor, sekolahan, pura, pasar, lapangan, balai banjar, kuburan dan lain-lain. Sedangkan sisanya berupa pelindung jurang, sungai dan sebagainya.

Dari ibukota Propinsi Bali (Denpasar) menuju ke Dalung dapat ditempuh sejauh 8 km dengan waktu tempuh 15-20 menit melalui jalan aspal naik kendaraan bermotor. Kemudian 13 km atau dalam waktu 25 menit menuju kota Kecamatan

---

<sup>6</sup> Ellies Setiyawati, dkk., "*Sejarah Berdirinya Balai Kajian Jarahnitra Denpasar*". Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar 1998/1999., hlm. 19.

Kuta dan 5,5 km atau 10 menit ke kota kecamatan Mengwi. Apabila dari Bandara Ngurah Rai dapat ditempuh sekitar 35 menit, dari Terminal Bus Ubung sekitar 10 menit dan dari Pelabuhan Laut Benoa sekitar 30 menit perjalanan darat. Jadi daerah Dalung tidak sulit untuk dijangkau dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Hanya sayangnya untuk angkutan umum (non pribadi) semacam bus atau mikrolet yang menghubungkan Dalung dengan kota kecamatan atau Denpasar belum ada. Angkutan umum yang ada yaitu dengan taksi atau ojek.

### **2.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar berkedudukan sebagai wadah operasional di bidang teknis serta penyelenggaraan kegiatan dokumentasi dan informasi tentang kesejarahan dan nilai tradisional.

#### **a. Tugas**

Tugas Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 001/O/1998 tanggal 7 Januari 1998 yaitu bertugas melaksanakan sebagian tugas teknis dari instansi vertikal yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tugas itu berupa pengkajian kesejarahan dan nilai tradisional daerah yaitu lingkungan budaya, sistem budaya dan nilai budaya. Pelaksanaan tugas tersebut berdasarkan pengarahannya dari Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Dalam melaksanakan tugas operasional, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional juga melaksanakan kegiatan teknis dan administratif yang berkaitan dengan kegiatan operasional.

Ketika Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional bergabung dan berada dibawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata ada beberapa perubahan mengenai tugas tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM. 52/OT.001/MKP/2003 tanggal 5 Desember 2003 disebutkan bahwa Balai Kajian Sejarah dan Nilai yang selanjutnya disebut Balai Kajian merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Pelestarian

dan Pengembangan Budaya yang sehari-hari dilaksanakan oleh Asisten Deputi Urusan Tradisi. Selanjutnya Asisten Deputi Urusan Tradisi dalam pelaksanaan sehari-hari, sepanjang berkaitan dengan materi bidang sejarah dikoordinasikan dengan Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala.

Balai Kajian Sejarah dan Nilai tradisional mempunyai tugas melaksanakan pelestarian kebudayaan yang mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pedokumentasian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, dan kesejarahan.

**b. Fungsi**

Sehubungan dengan kedudukannya dalam melaksanakan tugas Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar mempunyai fungsi :

1. Melakukan pengamatan dan analisis kesejarahan dan nilai tradisional.
2. Melakukan dokumentasi termasuk pelayanan informasi kesejarahan dan Nilai Tradisional daerah.
3. Melakukan Tata Usaha rumah tangga Balai.

Selanjutnya menurut Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No: KM. 52/OT.001/MKP/2003, tanggal 5 Desember 2003 dalam melaksanakan tugas Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program
2. Pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek kebudayaan dan kesejarahan.
3. Pengembangan hasil kajian
4. Pelaksanaan pengemasan hasil kajian dan pemanfaatannya
5. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan
6. Pelaksanaan perlindungan kebudayaan
7. Pelaksanaan pelayanan publik
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Kajian

Penelitian sejarah dan nilai tradisional di kawasan Bali, NTB dan NTT memang telah banyak dilakukan pada masa lalu dengan pendekatan sejarah dan antropologi oleh beberapa instansi. Namun kajian penelitian oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar pada masa datang dengan

mengacu pedoman kerja baik dari Direktorat Jarahnitra Direktorat Jenderal Kebudayaan dahulu maupun mengacu pada Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya maupun Deputy Bidang Sejarah dan Purbakala diarahkan agar mampu memperluas dan meningkatkan mutu kajian dengan menghindari pandangan serta penelitian yang tumpang tindih. Maka Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar melakukan koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi lain di daerah.

Sesuai dengan tugas fungsinya, tujuan kegiatan Balai Kajian adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan hasil kajian tentang kesejarahan yang berkaitan dengan peristiwa sejarah, pemikiran dan keteladanan tokoh sejarah, sejarah untuk pendidikan serta penjernihan masalah-masalah kesejarahan untuk diolah sebagai bahan pembinaan dan pengembangan kebudayaan.
2. Menyediakan hasil kajian tentang aspek nilai tradisional yang mencakup nilai-nilai yang terkandung dalam ceritera rakyat, permainan rakyat, upacara tradisional, naskah kuno, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, sistem ekonomi tradisional, sistem teknologi tradisional, sistem religi, pola lingkungan budaya, hubungan antar budaya dan perubahan lingkungan budaya untuk diolah sebagai bahan pembinaan dan pengembangan kebudayaan.
3. Mengusulkan konsep-konsep kebijakan untuk pembinaan dan pengembangan kebudayaan berdasarkan beberapa hasil kajian.

Dengan demikian, Balai Kajian ini dibentuk sebagai usaha mengembangkan potensi budaya dari berbagai suku bangsa karena Balai Kajian bertugas menginventarisasi potensi-potensi yang dimiliki suku bangsa tersebut untuk dikaji dan dianalisis. Selanjutnya menginformasikan bahan-bahan yang diperlukan bagi cendekiawan, pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Disamping itu Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar juga melaksanakan kegiatan seminar, ceramah, diskusi, lokakarya atau evaluasi mengenai hasil kajian kesejarahan dan nilai tradisional yang ada di wilayah garapan, kegiatan tersebut dilaksanakan pada setiap tahun anggaran.

Adapun wilayah garapan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan aspek kajian meliputi kesejarahan, tradisi, kepercayaan, lingkungan budaya

serta sistem budaya. Dalam perspektif sejarah dan nilai tradisional kondisi empirik wilayah Bali dan Nusa Tenggara dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Perjalanan sejarah Bali dan Nusa Tenggara memiliki akar historis yang panjang mencakup kehidupan prasejarah dan sejarah baik sejarah politik, ekonomi, agama dan sebagainya.
2. Nilai-nilai tradisional masyarakat merefleksikan perpaduan antara nilai tradisional lokal, tradisi besar yaitu agama-agama besar dan tradisi modern.
3. Sistem budaya masyarakat sangat kuat berakar pada sistem budaya bahari. Integrasi kawasan ini ke dalam struktur pemerintahan RI telah memperkembangkan sistem formal sehingga berkembang interaksi antara institusi tradisional dengan institusi formal atau modern.
4. Lingkungan budaya menggambarkan kondisi beragam yang merentang lingkungan budaya agraris persawahan, lingkungan budaya perladangan dan lingkungan budaya bahari.
5. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara tersimpan beragam naskah kuno, perspektif agama, bahasa dan suku bangsa/etnis.
6. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara menggambarkan suatu kondisi yang beraneka ragam (bhineka) dari susut etnis, agama, bahasa sehingga mempunyai kondisi yang rentan dalam masalah integrasi dan konflik. Kecuali itu kawasan ini terbuka dalam dinamika yang berdimensi lokal, nasional maupun global.

## **2.4 Wilayah Kerja**

Seperti telah sedikit disinggung di atas Balai Kajian dan Nilai Tradisional Denpasar mempunyai wilayah kerja Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Timur. Sebelumnya wilayah kerjanya hanya sampai di Nusa Tenggara Barat karena Nusa Tenggara Timur akan masuk wilayah kerja Balai Kajian Timor-Timur yang baru didirikan. Namun ketika hasil jajak pendapat Timor-Timur lepas dari wilayah Indonesia maka Nusa Tenggara Timur masuk dalam wilayah kajian Balai Kajian Denpasar. Bali Kajian Denpasar ini merupakan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional yang ke 9 di Indonesia. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0303/0/1995 Tanggal 4 Oktober 1995 mengenai Lokasi dan Wilayah Kerja Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, maka Balai Kajian Denpasar diantara Balai-Balai Kajian lainnya mempunyai wilayah kerja seperti dalam tabel dibawah ini :



No	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional D.I. Yogyakarta	a. D.I. Yogyakarta b. Jawa Timur c. Jawa Tengah
2.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang	a. Sulawesi Selatan b. Sulawesi Tengah c. Sulawesi Tenggara
3.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tanjung Pinang	a. Riau b. Jambi c. Sebagian Sumatera Utara.
4.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak	a. Kalimantan Barat b. Kalimantan Selatan c. Sebagian Kalimantan Timur
5.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado	a. Sulawesi Utara b. Sebagian Sulawesi Tengah
6.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung	Jawa Barat
7.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh	a. D.I. Aceh b. Sebagian Sumatera Utara
8.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon	Maluku
9.	Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar	a. Bali

Pada perkembangan berikutnya berdiri dua Balai Kajian lagi, yaitu di Padang Sumatera Barat dan Balai Kajian Jayapura di Irian Jaya atau Papua, maka jumlah Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional seluruhnya menjadi 11 Balai. Adapun mengenai Lokasi dan Wilayah Kerja diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.52/OT.001/MKP/2003 tanggal 5 Desember 2003 sebagai berikut :

No.	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Provinsi D.I. Yogyakarta</li> <li>b. Provinsi Jawa Timur</li> <li>c. Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
2.	Makasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Provinsi Sulawesi Selatan</li> <li>b. Provinsi Sulawesi Tenggara</li> </ul>
3.	Tanjung Pinang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Provinsi Riau</li> <li>b. Provinsi Jambi</li> <li>c. Provinsi Bangka Belitung</li> </ul>
4.	Pontianak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Provinsi Kalimantan Barat</li> <li>b. Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>c. Provinsi Kalimantan Tengah</li> <li>d. Provinsi Kalimantan Selatan</li> </ul>
5.	Manado	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Provinsi Sulawesi Utara</li> <li>b. Provinsi Sulawesi Tengah</li> <li>c. Provinsi Gorontalo</li> </ul>
6.	Bandung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Provinsi Jawa Barat</li> <li>b. Provinsi Banten</li> <li>c. Provinsi DKI Jakarta</li> <li>d. Provinsi Lampung</li> </ul>
7.	Banda Aceh	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Provinsi Nangroe Aceh Darusalam</li> <li>b. Provinsi Sumatera Utara</li> </ul>
8.	Ambon	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Provinsi Maluku</li> <li>b. Provinsi Maluku Utara</li> </ul>
9.	Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Provinsi Bali</li> <li>b. Provinsi Nusa Tenggara Barat</li> <li>c. Provinsi Nusa Tenggara Timur</li> </ul>
10.	Padang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Provinsi Sumatera Barat</li> <li>b. Provinsi Sumatera Selatan</li> <li>c. Provinsi Bengkulu</li> </ul>
11.	Jayapura	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Provinsi Papua</li> <li>b. Provinsi Papua Barat</li> </ul>

Seperti telah dituangkan dalam SK Menteri Kebudayaan dan Pariwisata di atas maka Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar mempunyai wilayah kerja 3 provinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

- a. Provinsi Bali terdiri dari 1 Kota dan 8 Kabupaten yaitu :
  1. Kota Denpasar
  2. Kabupaten Badung dengan ibukota di Badung
  3. Kabupaten Gianyar dengan ibukota di Gianyar
  4. Kabupaten Tabanan dengan ibukota di Tabanan
  5. Kabupaten Jembrana dengan ibukota di Negara
  6. Kabupaten Klungkung dengan ibukota Smarapura
  7. Kabupaten Bangli dengan ibukota di Bangli
  8. Kabupaten Karangasem dengan ibukota di Amlapura
  9. Kabupaten Buleleng dengan ibukota di Singaraja
  
- b. Propinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 2 Kota dan 6 Kabupaten yaitu :
  1. Kota Mataram
  2. Kota Bima
  3. Kabupaten Lombok Barat dengan ibukota di Gerung
  4. Kabupaten Lombok Tengah dengan ibukota di Praya
  5. Kabupaten Lombok Timur dengan ibukota di Selong
  6. Kabupaten Sumbawa dengan ibukota di Sumbawa Besar, kabupaten ini dimekarkan menjadi dua yaitu Kabupaten Sumbawa Barat dengan ibukotanya di Taliwang.
  7. Kabupaten Dompu dengan ibukota di Dompu
  8. Kabupaten Bima dengan ibukota di Raba
  
- c. Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 1 kota dan 13 Kabupaten yaitu :
  1. Kota Kupang
  2. Kabupaten Kupang dengan ibukota di Kupang
  3. Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibukota di Soe
  4. Kabupaten Timor Tengah Utara dengan ibukota di Kefamenanu
  5. Kabupaten Belu dengan ibukota di Atambua

6. Kabupaten Sumba Timur dengan ibukota di Waingapu
7. Kabupaten Sumba Barat dengan ibukota di Waikabubak
8. Kabupaten Manggarai dengan ibukota di Ruteng, kabupaten ini dimekarkan lagi yaitu Kabupaten Manggarai Barat dengan ibukota di Labuan Bajo.
9. Kabupaten Ngada dengan ibukota di Bajawa
10. Kabupaten Ende dengan ibukota di Ende
11. Kabupaten Sikka dengan ibukota di Maumere
12. Kabupaten Flores Timur dengan ibukota di Larantuka
13. Kabupaten Alor dengan ibukota di Kalabahi
14. Kabupaten Lembata dengan ibukota di Lewoleba

Tiga Provinsi tersebut secara historis adalah satu provinsi yaitu Propinsi Sunda Ketjil dengan ibukotanya di Singaraja-Bali.

## **BAB III**

# **PERKEMBANGAN BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL DENPASAR**

### **3.1 Induk yang Selalu Berubah**

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di bidang kebudayaan yang mengkaji masalah kesejarahan dan kenilaitradisional. Dalam perjalanan sejarahnya Balai Kajian ini berada dalam induk atau pusat yang berbeda. Sebelum berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, lembaga yang menangani kebudayaan dimulai pada masa penjajahan Jepang, yaitu dengan berdirinya *Keimin Bunka Sidhaso* (Pusat Kebudayaan) yang bertujuan memajukan mutu seni dan kebudayaan Indonesia, di mana para seniman Indonesia menampilkan karya mereka dalam membina identitas kebudayaan nasional.

Pada masa kemerdekaan, usaha secara administratif di bidang kebudayaan baru dimulai. Berdasarkan Keputusan Menteri P dan K tanggal 11 September 1946, No. 203 didirikan Bagian Kebudayaan pada Kementerian PP dan K. Tahun 1948, berdasarkan Keputusan Menteri PPPK tanggal 24 April 1948 Bagian Kebudayaan diganti dengan Bagian D. Tahun 1949 No. 57/5 Bagian D diganti dengan Jawatan Kebudayaan yang bertugas mengurus dan memelihara segala yang berhubungan dengan kebudayaan, yang kuno maupun yang baru. Tahun 1964 dengan meluasnya struktur organisasi, maka berdasarkan pada Keputusan Menteri PD dan K tanggal 7 Mei 1964, No. 34/1964 Jawatan Kebudayaan berubah menjadi Direktorat Kebudayaan dan di samping itu ada Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan dan Lembaga Museum Nasional.

Pada masa Kabinet Dwikora (1964—1966) Presiden menetapkan 3 (tiga) orang Pembantu Menteri PD dan K salah seorang adalah Pembantu Menteri Bidang Kebudayaan yang bertugas membantu menteri dan berfungsi sebagai koordinator tugas dan kebijakan menteri dalam bidang kebudayaan serta mengkoordinasikan direktorat dan lembaga yang ada.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 170/1966 dan Keputusan Kabinet Ampera No. 75/Kep/11/1966 tanggal 3 November 1966 Departemen P dan K mempunyai 5 (lima) Direktorat Jenderal salah satunya adalah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pada tahun 1969 ada reorganisasi, berdasarkan Keputusan Presiden No. 39/1969 ditetapkan 5 Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen P dan K. sebagai tindak lanjut sesuai dengan Keputusan Menteri P dan K No. 34 dan 35/1969 ditetapkan susunan Direktorat Jenderal Kebudayaan salah satunya adalah *Lembaga Sejarah dan Antropologi*. Lembaga inilah yang merupakan embrio dari Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional yang mempunyai UPT Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Selanjutnya, pada tahun 1975 berdasarkan Keputusan Menteri tanggal 25 April 1975, No. 079/0/75 maka tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah menyelenggarakan sebagian tugas pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh menteri. Untuk melaksanakan hal tersebut struktur organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan berubah lagi menjadi Sekretariat Direktorat Jenderal, 4 Direktorat dan 3 pusat salah satunya adalah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya yang merupakan perubahan dari Lembaga Sejarah dan Antropologi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 September 1980, No. 0222e/O/1980 susunan organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan disempurnakan, yaitu terdiri:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan
2. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional (Ditjarahnitra)
3. Direktorat Kesenian (Ditseni)
4. Direktorat Permuseuman (Ditmus)
5. Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Ditlinbinjarah)
6. Direktorat pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Ditbinyat).

Di samping itu, dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222g/O/1980, tanggal 11 September 1980 ditetapkan pula dua Unit Kerja Pusat, yaitu:

1. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
2. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Posisi Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional berada di bawah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional (Ditjarahnitra) yang merupakan perubahan dari Pusat Kajian Sejarah dan Budaya.

Ketika reformasi bergulir dan diadakan Pemilu 1999, maka dalam sidangnya MPR tahun 2000 mengangkat Abdurahman Wahid sebagai presiden RI. Dalam susunan kabinetnya Departemen pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) berubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), maka Direktorat Jenderal Kebudayaan akhirnya digabungkan ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata serta berubah menjadi Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, satunya lagi Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film. Secara administratif Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional berada di bawah Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film melalui Direktorat Tardisi dan Kepercayaan. Secara teknis berhubungan dengan Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala melalui Direktorat Sejarah. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep 06/KMKP/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

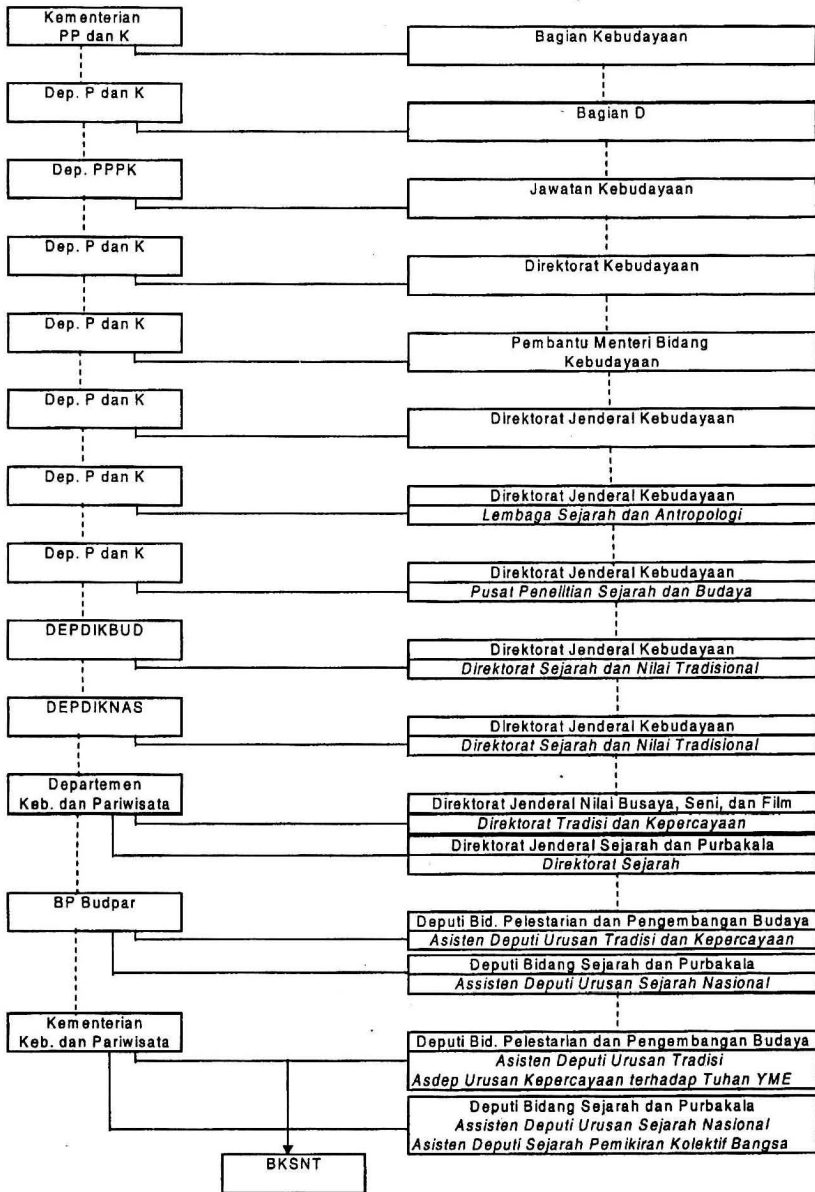
Pemerintahan Abdurahman Wahid hanya bertahan selama satu tahun, melalui sidang Istimewa MPR tahun 2001 Abdurahman Wahid digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Setelah menjadi presiden Megawati Soekarno Putri mengumumkan susunan Kabinet Gototong Royongnya, maka Departemen Kebudayaan dan Pariwisata berubah menjadi Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata. Pada waktu itu keberadaan UPT Kebudayaan di daerah mengalami perubahan pula, ada yang sebagian masuk ke pemerintah daerah dan ada pula yang masih tetap berada di bawah pusat. Karena di dalam struktur Menteri Negara, tidak dibenarkan ada struktur organisasi ke tingkat daerah, maka dibentuklah Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. Posisi Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, secara administratif berada di bawah Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya melalui Asisten Deputi Urusan Tradisi dan secara teknis juga berhubungan dengan Asisten Deputi Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, juga secara teknis berada di bawah Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala melalui Asisten Deputi Urusan Sejarah Nasional.

Pada akhirnya melalui Keppres No. 19, 30, 31 dan 32 tahun 2003, tanggal 26 Mei 2003 Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata digabungkan lagi dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan sendirinya UPT Kebudayaan yang berada di daerah kembali berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Posisinya masih berada di bawah Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan melalui Asisten Deputi Urusan Tradisi dan secara teknis berada di bawah Asisten Deputi Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di samping secara teknis juga masih berhubungan dengan Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala melalui Asisten Deputi Urusan Sejarah Nasional dan Asisten Deputi Sejarah Pemikiran Kolektif Bangsa. Sedangkan mengenai organisasi dan tata kerja Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kebudayaan No. KM 52/OT.001/MKP/2003 tanggal 5 Desember 2003.

Demikianlah berbagai perubahan lembaga induk Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, namun masih ada kemungkinan terjadi perubahan lagi. Dengan menunggu hasil susunan kabinet dari presiden terpilih melalui Pemilu presiden dua putaran, yaitu tanggal 5 Juli 2004 dan 20 September 2004. Untuk sementara waktu Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional tetap berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.



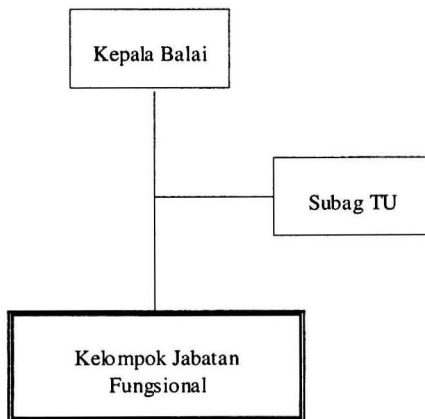
**SKEMA PERUBAHAN INDUK ORGANISASI DI PUSAT  
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL**



### 3.2 Struktur Organisasi

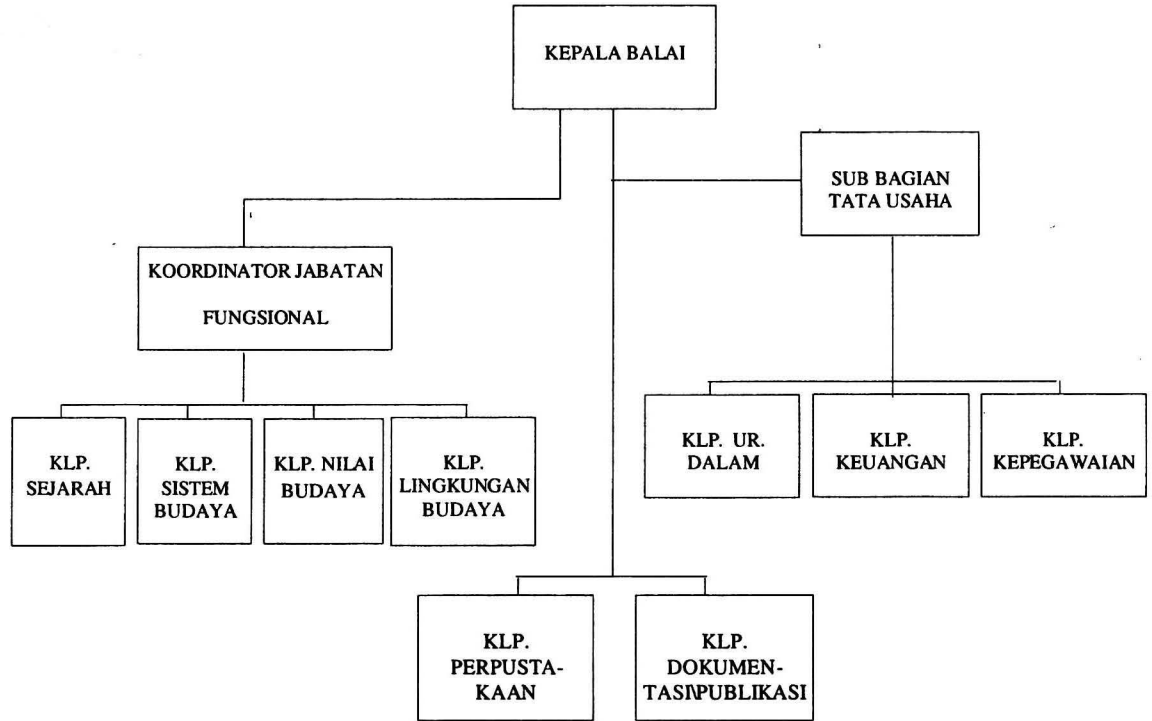
Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional adalah sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dulunya berada di bawah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 0222e/O/1980 mempunyai misi melaksanakan pembinaan dan pengembangan kesejarahan dan nilai tradisional yang mencakup segi non kebendaan dari keseluruhan unsur kebudayaan. Dengan demikian jika dilihat kedudukannya, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan dan secara operasional mengacu kepada kegiatan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Berikut ini dapat dilihat struktur organisasi Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 001/O/1998, tanggal 7 Januari 1998.

**BAGAN ORGANISASI BALAI KAJIAN SEJARAH DAN  
NILAI TRADISIONAL BERDASARKAN  
KEP. MENDIKBUD NO. 001/O/1998, TANGGAL 7 JANUARI 1998**



Sedangkan untuk pengembangan struktur pembagian tugasnya atau struktur operasional organisasi Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional adalah sebagai berikut.

BAGAN SUSUNAN OPERASIONAL ORGANISASI BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL



Berdasarkan bagan di atas maka struktur organisasi Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional itu terdiri dari:

- a. Kepala Balai
- b. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
- c. Koordinator Jabatan Fungsional (Kelompok Fungsional)

*a. Kepala Balai*

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai sebagai pelaksana kajian di daerah, dalam melaksanakan tugas pengkajian kesejarahan dan nilai tradisional, Kepala Balai harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungannya, baik dari unsur yang ada di pusat maupun di daerah serta instansi terkait lain.

Perincian tugas kepala balai adalah:

1. Membuat perencanaan yang berhubungan dengan pelaksana kegiatan operasional meliputi kajian dan administrasi.
2. Menentukan kebijakan/keputusan dalam pemecahan masalah yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari.
3. Mengatur pembagian kerja, mengatur hubungan kerja dan mengkoordinasikan tugas antara staf dengan melalui brifing, rapat, edaran, dan lain-lain.
4. Membimbing, mengarahkan, dan mendorong semangat kerja semua staf, apabila perlu melakukan teguran dan peringatan.
5. Memimpin dan mengevaluasi hasil kajian kesejarahan dan nilai tradisional.
6. Membuat laporan berkala tepat pada waktunya dan menyampaikan kepada pusat.

*b. Sub Bagian Tata Usaha*

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai. Untuk penyelenggaraan tugas itu, sub bagian tata usaha mempunyai fungsi melakukan surat menyurat,

perlengkapan dan rumah tangga; melakukan urusan kepegawaian dan melakukan urusan keuangan.

Adapun perincian tugasnya sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja tahunan sub bagian dan mempersiapkan penyusunan program kerja tahunan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
2. Melakukan urusan surat menyurat yang meliputi pengetikan, penggandaan, agenda, ekspedisi dan kearsipan.
3. Melakukan urusan barang perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, perawatan, inventarisasi, dan usul penghapusan.
4. Melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan kantor dan sekelilingnya.
5. Melakukan urusan keprotokolan, penerimaan tamu dan upacara.
6. Mengatur tata ruang kantor.
7. Mengurus, mencatat dan menyusun risalah rapat dinas di lingkungan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
8. Menyusun formasi usul pegawai.
9. Mempersiapkan usaha pengembangan dan pembinaan pegawai.
10. Mempersipkan ujian dinas pegawai.
11. Mempersiapkan usaha-usaha peningkatan disiplin pegawai.
12. Melakukan registrasi dan kearsipan kepegawaian dan termasuk KARPEG dan NIP.
13. Melakukan usaha peningkatan kesejahteraan pegawai antara lain ASKES, tabungan pegawai dan koperasi.
14. Mengurus cuti pegawai.
15. Menyusun usul rencana anggaran Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
16. Menyusun rencana penggunaan anggaran, permintaan UUDP dan mengurus penyelesaiannya.
17. Melakukan tata usaha pengurusan keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan.
18. Melakukan pengurusan gaji, uang lembur dan honorarium.
19. Menyusun laporan sub bagian dan mempersiapkan penyusunan laporan Balai.

Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh •

- (i) Urusan Dalam
- (ii) Urusan Kepegawaian
- (iii) Urusan Keuangan

(i) *Urusan Dalam*

Bagian Urusan Dalam tugasnya meliputi :

1. Menyusun program kerja tahunan sub bagian dan mempersiapkan program kerja tahunan Balai.
2. Melakukan urusan surat menyurat yang meliputi pengetikan, penggandaan, agenda, ekspedisi dan kearsipan. (Dasar: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0322/V/1983 tanggal 26 Juli 1983).
3. Melakukan urusan barang perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventarisasi dan usul penghapusan. (Dasar: Keputusan Presiden No. 29 tahun 1984, Keppres No. 10 tahun 1980, Keppres No. 15 tahun 1980, Inpres No. 3 tahun 1971, Keputusan Menteri Keuangan No. 225/MK/V/4/1971 tanggal 13 April 1971 dan Instruksi Mendikbud No. 10/M/1976 tanggal 26 Juni 1976).
4. Melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan kantor dan skelilingnya.
5. Melakukan urusan keprotokolan, penerimaan tamu dan upacara.
6. Mengatur tata ruang kantor.
7. Mengurus, mencatat dan menyusun risalah rapat dinas.
8. Menyusun laporan sub bagian dan mempersiapkan penyusunan laporan Balai. (Dasar: Keputusan Mendikbud RI No. 050/0/83 tanggal 19 Januari 1983).

(ii) *Urusan Kepegawaian*

Urusan Kepegawaian ini tugasnya meliputi :

1. Menyusun formasi pegawai (Dasar: Undang-Undang Pokok Kepegawaian No. 8 tahun 1974).

2. Menyiapkan usul mutasi kepegawaian: pengangkatan Capeg dan Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 30 Tahun 1980 dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 05/SE/1980), kenaikan gaji berkala (Keppres Nomor 29 tahun 1984 dan PP Nomor tahun 1977), kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat lainnya (Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979) serta pensiunan pegawai.
3. Mempersiapkan pengembangan kepegawaian; penataran, kursus-kursus, latihan pra jabatan, pemberian kesempatan belajar.
4. Mempersiapkan ujian dinas: tingkat I, tingkat II dan tingkat III.
5. Mempersiapkan usaha peningkatan disiplin pegawai (Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980) termasuk pelaksanaan DP3 (Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979).
6. Melaksanakan registrasi dan kearsipan kepegawaian termasuk NIP dan Karpeg (Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 01/SE/1975 dan Surat Sekertaris Jenderal depdikbud tanggal 6 Januari 1977 Nomor 36097/C/8/1977 serta pembuatan DUK (Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1979).
7. Melakukan usaha peningkatan kesejahteraan pegawai antara lain asuransi kesehatan, tabungan pegawai negeri dan koperasi pegawai.
8. Mengurus cuti pegawai (Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1976, Surat Edaran Kepala BAKN tanggal 25 Pebruari 1977 Nomor 01/SE.1977 serta SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 5 Oktober 1977 Nomor 0442/P/1977).

(iii) *Urusan Keuangan*

Tugas Urusan Keuangan ini meliputi :

1. Menyusun usul rencana anggaran Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
2. Menyusun rencana penggunaan anggaran, permintaan UUDP dan mengurus penyelesaiannya.
3. Melakukan tata usaha pengurusan keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan.
4. Melakukan pengurusan gaji, uang lembur dan honorarium.

**c. *Kelompok Pengamatan dan Analisis***

Kelompok pengamatan dan analisis mempunyai tugas melakukan pengkajian, analisis, penelitian dan penyusunan serta evaluasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesejarahan dan perkembangan nilai tradisional daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kelompok pengamatan dan analisa mempunyai fungsi melakukan perekaman, analisis dan evaluasi hal-hal yang berkaitan dengan kesejarahan, perkembangan sistem budaya, nilai budaya dan lingkungan budaya di daerah.

Seksi pengamatan dan analisa ini didukung oleh 4 (empat) kelompok yaitu:

- (i) Kelompok Sejarah
- (ii) Kelompok Sistem Budaya
- (iii) Kelompok Nilai Budaya
- (iv) Kelompok Lingkungan Budaya.

**(i) *Kelompok Sejarah***

Tugas kelompok sejarah ini antara lain melakukan kajian kesejarahan yang meliputi sejarah untuk pendidikan, kesadaran sejarah, penjernihan sejarah, dan lokal sejarah. Adapun secara terperinci tugas kelompok sejarah di Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional sebagai berikut:

1. Merencanakan, menyiapkan/menyediakan bahan pembinaan dan pengembangan kebudayaan di bidang kesejarahan berupa berbagai hasil kajian tentang kesejarahan yang berkaitan dengan peristiwa sejarah, pemikiran serta keteladanan tokoh sejarah, sejarah untuk pendidikan serta penjernihan masalah-masalah kesejarahan yang berada di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
2. Menyediakan konsep-konsep kebijakan pengembangan kebudayaan dibidang kesejarahan berdasarkan hasil kajian.
3. Melaksanakan kegiatan seminar, diskusi, lokakarya atau ceramah mengenai hasil kesejarahan wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
4. Melaksanakan penelitian/pengkajian sejarah.



*(ii) Kelompok Sistem Budaya*

Kelompok sistem budaya melakukan kajian mengenai sistem kemasyarakatan, sistem religi dan pengetahuan, sistem ekonomi tradisional dan sistem teknologi tradisional. Sistem kemasyarakatan sarasanya meliputi data dan informasi mengenai sistem kekerabatan, daur hidup, kesatuan setempat. Sistem religi atau pengetahuan mengenai sistem kepercayaan terhadap dunia ghaib, dewa-dewa, makhluk haklus, kekuatan sakti dan masalah kematian.

Sistem ekonomi tradisional sarasanya mengenai sistem produksi, distribusi dan konsumsi pada berbagai masyarakat serta kecenderungan-kecenderungan yang terjadi dalam kehidupan ekonomi. Sistem teknologi tradisional sarasanya mengenai peralatan produktif, senjata, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan.

Secara lebih rinci tugas daripada kelompok sistem budaya yakni:

1. Merencanakan, menyiapkan/menyediakan bahan pembinaan dan pengembangan kebudayaan dibidang sistem budaya berupa berbagai hasil kajian yang berkaitan dengan sistem kemasyarakatan, sistem religi dan pengetahuan, sistem ekonomi tradisional yang berada di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
2. Menyediakan konsep-konsep kebijakan pengembangan kebudayaan di bidang sistem budaya berdasarkan hasil kajian.
3. Melaksanakan kegiatan seminar, diskusi, lokakarya atau ceramah mengenai hasil kajian sistem budaya Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
4. Melaksanakan penelitian/pengkajian sistem budaya di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

*(iii) Kelompok Nilai Budaya*

Nilai budaya pada hakekatnya merupakan abstraksi pengalaman manusia dalam proses adaptasi terhadap lingkungannya. Dalam hal ini kelompok nilai budaya sasarannya mengenai nilai budaya yang terkandung dalam cerita rakyat, ungkapan tradisional, permainan rakyat/anak-anak, upacara tradisional dan naskah kuno.

Perincian tugas dari kelompok nilai budaya sebagai berikut:

1. Merencanakan, menyiapkan/menyediakan bahan pembinaan dan pengembangan kebudayaan dibidang nilai budaya berupa berbagai hasil kajian cerita rakyat, upacara tradisional, permainan rakyat, ungkapan tradisional dan naskah kuno yang berada di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
2. Menyediakan konsep-konsep kebijakan pengembangan kebudayaan di bidang nilai budaya berdasarkan hasil kajian.
3. Melaksanakan kegiatan seminar, diskusi, lokakarya atau ceramah mengenai hasil kajian nilai budaya wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
4. Melaksanakan penelitian/pengkajian nilai budaya di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

*(iv). Kelompok Lingkungan Budaya*

Sasaran kelompok lingkungan budaya ialah terseedianya data dan informasi mengenai: (a) pola lingkungan budaya yang mencakup masalah kependudukan; (b) hubungan antar budaya yang mencakup masalah minoritas-mayoritas, asimilasi, urbanisasi dan kesukubangsaan; dan (c) perubahan lingkungan budaya mencakup masalah perubahan pola pemukiman, mata pencaharian, struktur sosial, urbanisasi dan modernisasi.

Secara lebih terperinci tugas kelompok lingkungan budaya yaitu:

1. Merencanakan, menyiapkan/menyediakan bahan pembinaan dan pengembangan kebudayaan dibidang lingkungan budaya berupa berbagai hasil kajian yang berkaitan dengan pola lingkungan budaya, hubungan antar budaya dan perubahan

- lingkungan yang berada di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
2. Menyediakan konsep-konsep kebijakan pengembangan kebudayaan dibidang lingkungan budaya berdasarkan hasil kajian.
  3. Melaksanakan kegiatan seminar, diskusi, lokakarya atau ceramah mengenai hasil kajian lingkungan budaya Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
  4. Melaksanakan penelitian/pengkajian dibidang lingkungan budaya di wilayah yang berada di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
  5. Pemetaan lingkungan budaya.

Untuk mengatur mekanisme kerja antar anggota dalam masing-masing kelompok dan antar kelompok maka ditunjuklah seorang ketua kelompok. Khusus untuk kelompok fungsional ini juga ditunjuk seorang koordinator fungsional dari peneliti senior. Jabatan ketua kelompok dan koordinator fungsional merupakan jabatan non struktural yang diangkat berdasarkan surat keputusan secara intern yaitu Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar.

**d. *Kelompok Dokumentasi dan Informasi***

Kelompok ini mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan sumber informasi kesejarahan dan nilai tradisional serta memberikan pelayanan informasi mengenai kesejarahan dan nilai tradisional. Perincian tugas seksi dokumentasi dan informasi sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan dan penyimpanan/dokumentasi sumber informasi kesejarahan dan nilai tradisional daerah.
2. Melakukan pengelolaan perpustakaan Balai.
3. Melakukan penyebarluasan dan pelayanan informasi kesejarahan dan nilai tradisional daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi itu kelompok dokumentasi dan informasi didukung oleh urusan dokumentasi, urusan perpustakaan serta urusan informasi dan publikasi yang semuanya itu adalah non struktural. Adapun perincian tugasnya sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja tahunan seksi.
2. Mengumpulkan dan mengolah data kesejarahan, nilai budaya, sistem budaya dan lingkungan budaya.
3. Mencatat dan menyusun data kesejarahan, nilai budaya, sistem budaya dan lingkungan budaya.
4. Mendokumentasikan data kesejarahan, nilai budaya, sistem budaya dan lingkungan budaya.
5. Melakukan pengurusan perpustakaan tentang kesejarahan, nilai budaya, sistem budaya dan lingkungan budaya.
6. Merencanakan dan mempersiapkan publikasi dibidang kesejarahan, nilai budaya, sistem budaya dan lingkungan budaya.
7. Melakukan publikasi di bidang kesejarahan, nilai budaya, sistem budaya dan lingkungan budaya.
8. Menyusun laporan seksi.

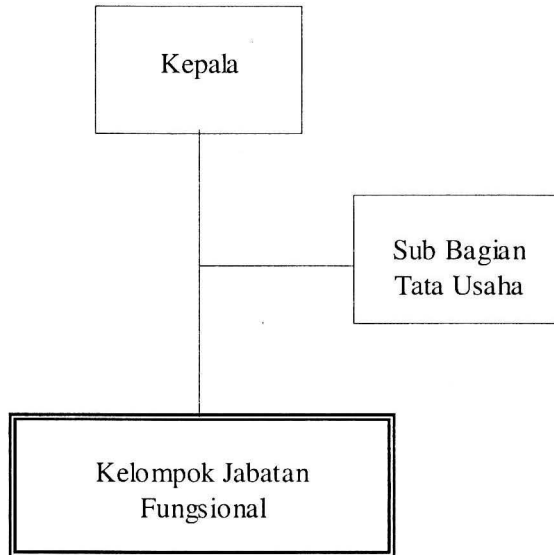
Seiring dengan perubahan politik di era reformasi ini, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional seperti telah diuraikan di atas juga mengalami perubahan struktur organisasi. Semula di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan Nasional, setelah itu masuk ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Setelah Presiden Megawati mengumumkan susunan Kabinet Gotong Royong kedudukan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Pariwisata digabungkan dengan instansi pariwisata ke dalam Kementerian Negara. Di dalam struktur Menteri Negara, tidak dibenarkan ada struktur organisasi ke tingkat bawah. Maka dibentuklah Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, namun akhirnya lembaga tersebut juga digabung dengan Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan demikian, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Secara struktur administrative berada di bawah Asisten Deputy Urusan Tradisi, Deputy Bidang Pelestarian Pengembangan Budaya. Secara teknis juga berhubungan dengan Asdep Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, bidang kesejarahan secara teknis juga berhubungan dengan Deputy Sejarah dan Purbakala khususnya Asisten Deputy Urusan Sejarah Nasional.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: Km 52/OT.001/MKP/2003, tanggal 5 Desember 2003, tentang Organisasi dan Tata

Kerja Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, maka terjadi perubahan mengenai tugas, fungsi serta susunan organisasi. Dalam Bab I, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Kerja Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional yang selanjutnya disebut Balai Kajian merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya yang sehari-hari dilaksanakan oleh Asisten Deputy Urusan Tradisi. Ayat (2) Asisten Deputy Urusan Tradisi dalam pelaksanaan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sepanjang berkaitan dengan materi bidang sejarah dikoordinasikan dengan Deputy Bidang Sejarah dan Purbakala (dalam hal ini Asisten Deputy Urusan Sejarah Nasional), ayat (3) Balai Kajian di propinsi dikepalai oleh seorang kepala. Dalam Pasal 2 disebutkan Balai kajian mempunyai tugas melaksanakan pelestarian kebudayaan yang mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pendokumentasian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, dan kesejarahan.

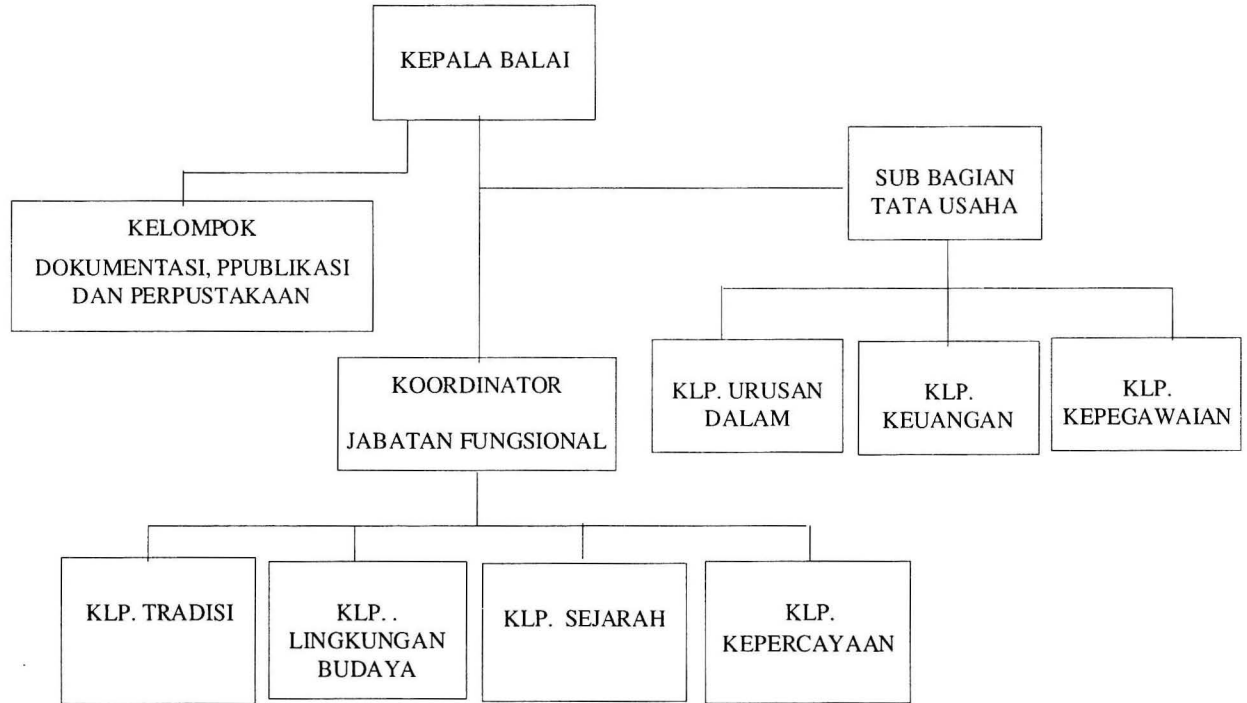
Bab II mengenai Susunan Organisasi, Pasal 4 ayat (1) Balai Kajian terdiri atas: a) Subbagian Tata Usaha, b) Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 5 menyebutkan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan persuratan serta rumah tangga Balai kajian. Pasal 6 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAGAN ORGANISASI BALAI KAJIAN SEJARAH DAN  
NILAI TRADISIONAL BERDASARKAN  
(KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NO: KM52/  
OT.001/MKP/2003, TANGGAL 5 DESEMBER 2003**



Sedangkan untuk struktur operasional Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional; berubah sebagai berikut.

## BAGAN SUSUNAN OPERASIONAL ORGANISASI BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL



Berdasarkan Bagan di atas maka ada beberapa perubahan. Untuk Kepala dan Kasubbag TU, beserta kelompok administrasi yaitu: Keuangan, Urusan Dalam maupun Kepegawaian tidak ada perubahan, baik kedudukan, tugas maupun fungsinya. Perubahan hanya dalam hal eselonisasi untuk Kepala dan Kasubbag TU, berdasarkan Bab IV, Pasal 15, Kepala yang dulunya eselon IIIb menjadi IIIa, sedangkan Kasubbag TU yang dulunya IVb menjadi IVa.

Perubahan yang terjadi adalah pada Kelompok Fungsional di mana perubahan tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Menurut Bab I, Pasal 2, yaitu ada tambahan tugas baru mengenai Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Kesenian. Namun, untuk tugas di bidang kesenian ini belum terealisasi, sedangkan kepercayaan sudah dimulai sejak tahun 2003. jadi untuk kelompok fungsional sekarang terdiri dari:

- (i) Kelompok Sejarah
- (ii) Kelompok Tradisi
- (iii) Kelompok Lingkungan Budaya
- (iv) Kelompok Kepercayaan

*(i) Kelompok Sejarah*

Tugas dan fungsi kelompok sejarah masih sama dengan sebelumnya hanya saja secara teknis sekarang berada di bawah Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, melalui Asisten Deputi Urusan sejarah Nasional yang dulunya bernama Direktorat Sejarah. Bahkan dalam struktur baru juga berkoordinasi secara teknis dengan Asisten Deputi Sejarah Pemikiran Kolekti/Bangsa. Selain tugas yang sama sebelumnya, melalui program pokok di bidang sejarah yang dibuat oleh Asisten Deputi Urusan Sejarah nasional tahun 2004 ditekankan program strategi sebagai berikut.

1. Sejarah Nasional Indonesia
2. Sejarah Lokal:
  - Pelaksanaan Otoda (Pemekaran Wilayah dan Potensi Konflik)
  - Sejarah Pemilu dalam Kajian Perbandingan dan Pemetaan Pemilu
3. Sejarah Sosial:
  - Sejarah Kota (Propinsi, Kabupaten/Kota)
  - Sejarah Berbagai Konflik di Daerah
  - Sejarah Masyarakat di wilayah perbatasan Antarnegara



- Sejarah Suku Bangsa (Ethno – History)
  - Sejarah Lingkungan (Eco History): Pencemaran lingkungan, masalah-masalah kehutanan, musibah bencana alam: banjir, longsor, kekeringan, gunung meletus, dan sebagainya.
4. Sejarah Maritim: pelabuhan, pelayaran, masyarakat laut/nelayan, masyarakat pulau kecil/terpencil.
  5. Peta Kebudayaan. Program ini merupakan lintas Deputi, Asdep Sejarah mengambil bagian dalam pembuatan Peta Sejarah, sedangkan Balai kajian khususnya kelompok sejarah berperan aktif dalam menyiapkan bahan dan data ke dalam format data yang akan dikerjakan oleh Bakorsurtanal.

Program dari Asdep Pemikiran Kolektif/Bangsa yaitu mengenai sejarah kebudayaan yang meliputi: sejarah pemikiran/pendidikan, sejarah suku bangsa, sejarah seni sastra, dan arsitektur.

(ii) *Kelompok Tradisi*

Kelompok ini merupakan gabungan dua kelompok dalam struktur lama yaitu Kelompok Sistem Budaya dan Kelompok Nilai Budaya. Tugas dan fungsinya merupakan perpaduan tugas dua kelompok tersebut serta tidak ada perubahan yang mendasar.

(iii) *Kelompok Lingkungan Budaya*

Kelompok ini tidak ada perubahan, baik mengenai tugas maupun fungsinya.

(iv) *Kelompok Kepercayaan*

Setelah melalui berbagai perdebatan, eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diakui secara terhormat dengan memberikan tempat di dalam struktur departemental pemerintah negara di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Pembinaan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Ditbinyat). Ketika Ditjenbud bergabung dengan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Ditbinyat berubah menjadi Direktorat Tradisi dan Kepercayaan (Ditjen Nilai Budaya, Seni, dan Film).

Setelah itu berubah lagi ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang kemudian menjadi Menteri negara. Di dalam struktur Menteri Negara tidak dibenarkan ada struktur organisasi di tingkat daerah. maka dibentuklah Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu Deputi Pelestarian dan Pengembangan Budaya. Salah satu direktorat yang berada di bawah Deputi Pelestarian dan Pengembangan Budaya ditugasi untuk membina kelompok Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Direktorat Tradisi dan Kepercayaan. Pada perkembangan berikutnya akhirnya Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata digabung lagi dengan Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata, untuk menangani kepercayaan maka diserahkan kepada Asisten Deputi Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di bawah Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya.

Dengan penempatan itu, kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak lagi dalam posisi untuk *diawasi* melainkan *dibina*, dan sekaligus tidak diakui sebagai kepercayaan keagamaan melainkan unsur kebudayaan, yaitu *budaya spiritual*. Untuk pembinaan di tingkat daerah kewenangannya diberikan kepada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional bersama-sama dengan instansi lain yang terkait. Walaupun pada kenyataannya suatu organisasi penghayat memiliki anggota sangat banyak di masyarakat, akan tetapi tidak didaftarkan keorganisasiannya, maka organisasi itu dianggap tidak sah/legal. Karena itu Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional berhak bila ada perkumpulan budaya spiritual di masyarakat segera mendaftarkan perkumpulannya ke Balai Kajian, kemudian akan diteruskan ke pusat untuk mendapatkan nomor inventarisasi. Balai Kajian juga memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan aktivitas kepercayaan yang dianutnya.

Sehubungan dengan tugas tersebut, maka Balai Kajian membentuk kelompok baru, yaitu Kelompok Kepercayaan dengan tugas melakukan kegiatan penelitian seperti:

- menginventarisasi organisasi ajarannya sesuai dengan format dan daftar pertanyaan inventarisasi ajaran kepercayaan
- mengkaji ajaran-ajarannya
- mensosialisasikan ajaran-ajaran yang lahir ke masyarakat luas
- melakukan pembinaan berupa bimbingan dan pengendalian organisasi

- memfasilitasi berbagai pertemuan antar kelompok penghayat melalui sarasehan, diskusi, seminar, dan sebagainya.

Struktur baru di Balai kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar, untuk kelompok Dokumentasi dan Informasi serta Kelompok Perpustakaan digabung menjadi satu, yaitu Kelompok Urusan Dokumentasi, Informasi, Publikasi, dan Perpustakaan. Mengenai tugas dan fungsinya masih sama seperti struktur sebelumnya.

Untuk melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari, maka Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar membuat Surat keputusan No.: 25/SK/BKSNT/12.11/2004, tanggal 12 Pebruari 2004 tentang Pembentukan Kelompok berserta susunan Ketua Kelompok di lingkungan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar tahun anggaran 2004. Susunan kelompok beserta ketua kelompok tersebut yaitu:

1. Nuryahman, S.S. sebagai Ketua Kelompok Aspek Sejarah.
2. Drs. I Wayan Rupa, sebagai Ketua Kelompok Aspek Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Drs. I Wayan Sudarma, sebagai Ketua Kelompok Aspek Lingkungan Budaya
4. Drs. I Made Sumerta, sebagai Ketua Kelompok Aspek Tradisi
5. Drs. I Wayan Namiartha, sebagai Ketua Kelompok Urusan Dalam
6. I Made Lodra, S.Sos., sebagai Ketua Kelompok Urusan Keuangan
7. I Rai Suanda, S.Sos., sebagai Ketua Kelompok Urusan Kepegawaian
8. I Made Sedana, B.A., sebagai Ketua kelompok Urusan Dokumentasi, Publikasi, Informasi, dan Perpustakaan
9. I Made Suarsna, S.H. sebagai Pembuat Laporan dan Pencatat Kegiatan.

### **3.3 Berpisah dengan Saudaranya**

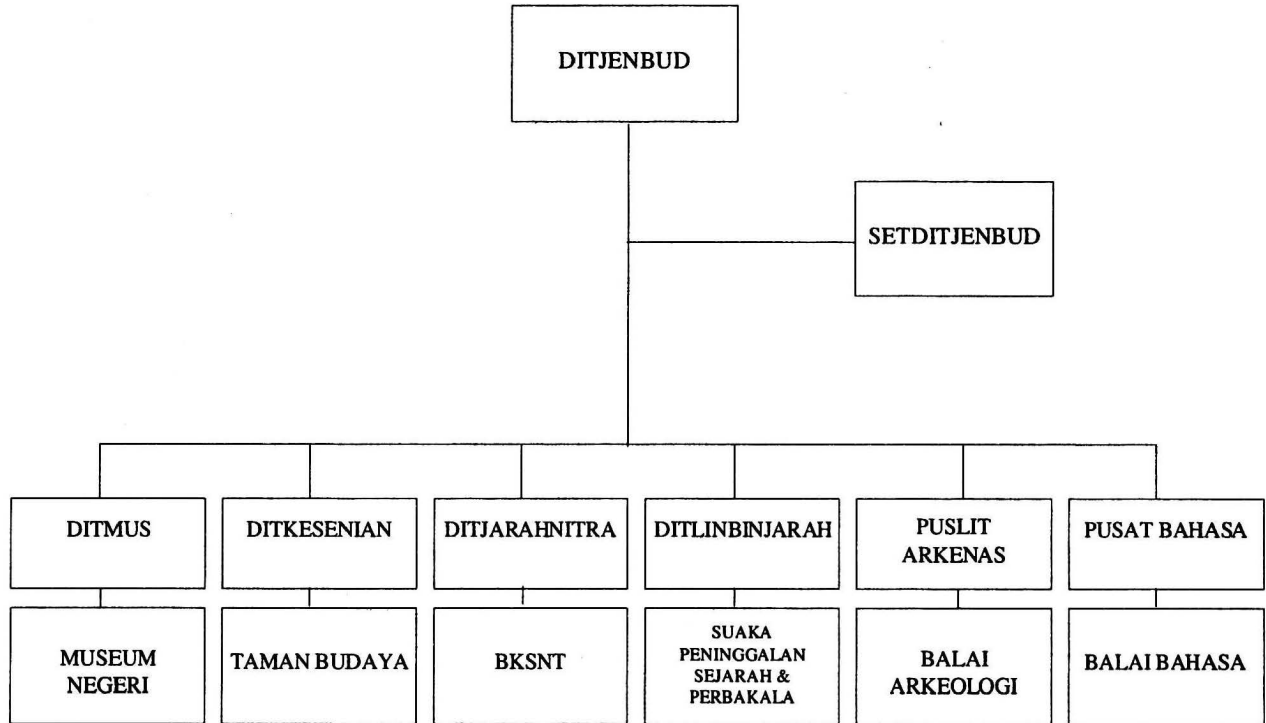
Direktorat Jenderal Kebudayaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebelum diintegrasikan ke Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai struktur organisasi ke daerah; yaitu berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang kebudayaan, Unit pelaksana teknis tersebut masing-masing secara hirarki bertanggung jawab kepada Direktorat maupun Pusat yang ada di Direktorat jenderal Kebudayaan, UPT-UPT tersebut, yaitu:

1. Museum Negeri Propinsi berada di bawah Direktorat Permuseuman (Ditmus)
2. Taman Budaya berada di bawah Direktorat Kesenian (Ditseni)
3. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional berada di bawah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional (Ditjarahnitra)
4. Suaka Peninggalan Sejarah dan Peninggalan Purbakala berada di bawah (Ditlinbinjarah)
5. Balai Arkeologi berada di bawah Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas)
6. Balai Bahasa berada di bawah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Pusbinbangsa).

Keenam UPT Kebudayaan tersebut di daerah saling menjalin hubungan yang harmonis, baik koordinasi maupun kegiatan-kegiatan lain di luar tugas dan fungsinya seperti olah raga dan lain sebagainya. Di Bali keenam UPT tersebut ada dan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar merupakan UPT termuda di Bali.

Seiring perubahan politik yang terjadi dan bergulirnya reformasi, di antaranya sejumlah agenda reformasi adalah demokratisasi, desentralisasi pemerintahan lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi daerah dan khususnya PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom tertuang bahwa kebudayaan menjadi kewenangan pemerintah daerah, dengan dasar tersebut maka UPT kebudayaan yang mempunyai wilayah kerja di satu propinsi masuk ke dalam UPT Pemerintah Daerah, antara lain: Museum Negeri Bali dan Taman Budaya Denpasar, sedangkan Balai Bahasa masih berada di pusat dan tetap di Departemen Pendidikan Nasional di bawah Pusat Bahasa. Tiga UPT lain BKSNT, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Balai Pelestarian dan Pembinaan Peninggalan Purbakala/BP3), Balai Arkeologi (Balar) tetap berada satu induk, yaitu di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, walaupun berbeda Deputi. Keberadaannya masih dipertahankan di pusat dikarenakan mempunyai wilayah kerja lintas propinsi, yaitu wilayah Propinsi Bali, NTB, dan NTT. Demikianlah UPT-UPT kebudayaan yang ada di daerah, kini telah berbeda induknya, namun demikian tetap memegang visi dan misi yang sama, yaitu mengembangkan dan membina kebaudayaan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

## BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DITJENBUD



### 3.4 Sumber Daya Manusia

Manakala Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 (GBHN) dinyatakan berlaku sebagai acuan Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua (PJP II) di republik ini, peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) disemua bidang adalah merupakan karakteristik utama pembangunan nasional. Dalam perkembangan selanjutnya, peningkatan mutu SDM bahkan dipandang sebagai predisposisi keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, peningkatan mutu SDM melalui pembangunan pendidikan dipandang sebagai upaya peningkatan kemampuan daya saing bangsa dalam era globalisasi, sehingga Bangsa Indonesia mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar (BKSNT Dps) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0303/O/1995 tanggal 4 Oktober 1995,<sup>7</sup> yang peresmian kantor dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu Bapak Prof. Dr. Ing. Wardiman Djoyonegoro pada tanggal 7 Nopember 1996. BKSNT Denpasar sebagai UPT diberikan kewenangan berlandaskan hukum yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 001/O/1998 tanggal 7 Januari 1998, dengan tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam bidang kesejarahan dan kenilaitradisional. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BKSNT Denpasar mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengamatan dan analisis kesejarahan dan kenilaitradisional yang tercermin dalam sistem kemasyarakatan, sistem teknologi, sistem pengetahuan dan relegi, sistem ekonomi dan tradisi lisan.
2. Melaksanakan pendokumentasian dan publikasi hasil kajian dan rekaman kesejarahan dan kenilaitradisional.
3. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan rumah tangga Balai Kajian.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Lihat, *Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0303/O/1995 Tanggal 4 Oktober 1995*.

<sup>8</sup> BKSNT Denpasar, "Renstra BKSNT Denpasar Tahun 2002 – 2007 (Keputusan Kepala No. 244/SK/BKSNT/9.IX/2002 ", (Denpasar:Naskah belum diterbitkan, 2002), p. 2.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan, maka pada awal pembentukan BKSNT Denpasar tenaga yang ada sebagian besar masih berstatus pegawai dengan nota dinas sebanyak 20 orang dan 4 orang dengan SK definitif. Tenaga ini diambil dari berbagai instansi seperti dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali, Kantor Inspeksi Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Badung, Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, serta dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Sedangkan sebagai pelaksana harian (PLH Kepala BKSNT Denpasar) periode bulan April sampai Oktober 1996 dijabat oleh Bapak Drs. Ida Bagus Mayun. Beliau bertugas mempersiapkan sarana dan prasarana kantor sampai kantor bisa terbentuk. Disamping itu beliau juga sebagai penanggungjawab pengkoordinir program kegiatan Balai Kajian Jarahnitra Denpasar sampai kepala definitif bisa diangkat. Mengenai gambaran lebih jelas keadaan pegawai pada awal pembentukan BKSNT Denpasar dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1**  
**Keadaan Pegawai Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar**  
**Tahun 1996**

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Drs. Ida Bagus Mayun	PLH Kepala BKSNT Dps	PLH Periode April-Oktober 1996
2.	Dra. S. Swarsi	Kepala	Definitif sejak 12 Nopember 1996
3.	Drs. I Made Purna	Kasubag TU	Definitif sejak 5 Nopember 1996
4.	Ni Luh Widasih, BA.	Pembantu Pimpinan	Definitif sejak 1 Oktober 1996
5.	I Wayan Piada	Pembantu Pimpinan	Definitif sejak 1 Oktober 1996
6.	Drs. I Wayan Namiartha	Pembantu Pimpinan	Nota Dinas
7.	Drs I Wayan Rupa	Pembantu Pimpinan	Nota Dinas
8.	Drs. I Wayan Sudarma	Pembantu Pimpinan	Nota Dinas
9.	Dra. I Gusti Ayu Armini	Pembantu Pimpinan	Nota Dinas
10.	Drs. I Made Sumerta	Pembantu Pimpinan	Nota Dinas
11.	Dra. Ni Luh Ariani	Pembantu Pimpinan	Nota Dinas
12.	I Rai Suanda	Pembantu Pimpinan	Nota Dinas
13.	I Made Suarsana, SH.	Pembantu Pimpinan	Nota Dinas
14.	Ni Made Sumiasih	Pembantu Pimpinan	Nota Dinas
15.	I Dw. Ayu Nyoman Seniari	Pembantu Pimpinan	Nota Dinas
16.	I Made Lodra	Pembantu Pimpinan	Nota Dinas
17.	I Wayan Sukadana, BA.	Pembantu Pimpinan	Nota Dinas
18.	I Made Sedana, BA.	Pelaksana	Nota Dinas
19.	I Wayan Rudita	Pelaksana	Nota Dinas
20.	I Gede Yasa Wardana	Pelaksana	Nota Dinas
21.	I Ketut Sukada	Pelaksana	Nota Dinas
22.	I Putu Sudarsana	Pelaksana	Nota Dinas
23.	I Made Sumitra	Pelaksana	Nota Dinas
24.	I Made Deyana	Pelaksana	Nota Dinas
25.	Ni Nyoman Suarni	Pelaksana	Nota Dinas

*Sumber: Data Kepegawaian BKSNT Denpasar Tahun 1996.*



Di dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 8 tahun 1974, terdapat ketentuan tentang dasar-dasar pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dapat dipercaya, serta syarat-syarat obyektif lainnya.<sup>9</sup> Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan suatu organisasi. Jabatan dapat ditinjau dari dua sudut yaitu: (1) Jabatan struktural, (2) Jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi seperti Kepala Lembaga dan Kasubag Tata Usaha. Sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak jelas disebut atau digambarkan dalam struktur organisasi, tapi jabatan itu harus ada karena fungsinya yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas organisasi itu seperti peneliti dan yang lainnya. Pada umumnya jabatan struktural bersifat managerial, sedangkan jabatan fungsional adalah jabatan yang bersifat teknis.<sup>10</sup>

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 001/O/1998 Bab I Pasal 1 Ayat 2, disebutkan bahwa Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional dipimpin oleh seorang kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis bertanggungjawab kepada Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di propinsi tempat Balai Kajian berada.<sup>11</sup> Untuk memenuhi ketentuan diatas maka BKSNT Denpasar perlu mengangkat seorang Kepala Balai dan Kasubag TU yang definitif guna menjalankan tugas dan fungsi Balai.

Diangkatnya Kepala Balai definitif pertama berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 54705/A2.I.2/KP/1996 tanggal 2 Oktober 1996,<sup>12</sup> yakni Ibu Dra. S. Swarsi yang sebelumnya bertugas di Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali. Kepala Balai Ibu Dra. S. Swarsi dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali Bapak

---

<sup>9</sup> H. Naingolan, *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Tanpa penerbit, 1988), p. 119.

<sup>10</sup> *Ibid.* Lihat juga, Drs. Sudiman, *Kepegawaian Edisi Kedua*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI, 1999), pp. 27-28.

<sup>11</sup> Lihat, *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 001/O/1998 Tentang Organisasi dan Tatakerja BKSNT.*

<sup>12</sup> Untuk lebih jelas lihat, *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 54705/A2.I.2/KP/1996 tanggal 2 Oktober 1996* tentang Pengangkatan Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar.

Drs. Beratha Subawa pada tanggal 12 Nopember 1996 di Denpasar.<sup>13</sup> Kasubag TU definitif pertama Bapak Drs. I Made Purna yang sebelumnya bertugas di Kantor Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Jakarta diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0665/Fl.II/CI. 1996 tanggal 24 Juni 1996.<sup>14</sup> Pelantikan Kasubag TU dilakukan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan pada tanggal 5 Nopember 1996.<sup>15</sup> Diangkatnya Kepala Balai dan Kasubag TU definitif ini, sehingga program-program BKSNT Denpasar selaku lembaga baru mulai dilakukan secara bertahap.

Sebagai lembaga yang pada awalnya belum memiliki pengalaman dalam menfungsikan Tupoksinya, maka atas petunjuk Prof. Dr. Edi Sedyawati (Dirjen Kebudayaan) telah menunjuk tiga orang konsultan teknis yaitu Drs. Wayan Geriya sebagai konsultan di bidang antropologi, dan Dr. A.A. Gde Putra Agung dan Dr. Gde Parimarta MA konsultan di bidang sejarah.

Adapun Visi BKSNT Denpasar adalah mewujudkan Balai sebagai lembaga dengan kopetensi andal dibidang pengkajian dan informasi kebudayaan dengan fokus kesejarahan dan nilai tradisional. Untuk mewujudkan visi tersebut BKSNT Denpasar memiliki misi antara lain:

1. Mengembangkan kajian sejarah dan nilai tradisional secara multi disiplin dan berkelanjutan.
2. Menerapkan hasil kajian dalam mendukung pengembangan kebudayaan, pariwisata, dan pendidikan.
3. Menumbuhkan Balai sebagai sumber informasi kebudayaan.
4. Menumbuhkembangkan Balai secara harmoni dalam konteks lokal dan nasional.<sup>16</sup>

Perhatian paling mendesak yang harus dilakukan adalah masalah pegawai, baik tenaga teknis maupun urusan administrasi. Disamping itu usaha untuk mempercepat pengurusan SK definitif bagi pegawai yang masih bertugas dengan nota dinas.

---

<sup>13</sup> Untuk lebih jelas lihat, *Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 324/UM/3/1996 tanggal 12 Nopember 1996.*

<sup>14</sup> Untuk lebih jelas lihat, *Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0665/Fl.II/CI. 1996 tanggal 24 Juni 1996.*

<sup>15</sup> Lihat, *Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 2636/Fl.2/CI.1996 tanggal 5 Nopember 1996.*

<sup>16</sup> Dra. S. Swarsi, "Memori Akhir Jabatan (1996 – 2002)", (Denpasar: Naskah belum diterbitkan, 2002), p. 5.

Awal pembentukan jumlah pegawai sebanyak 25 orang, pegawai yang sudah definitif 4 orang, dengan nota dinas sebanyak 20 orang dan PLH 1 orang. Tahun berikutnya 1997 telah terjadi perubahan yang cukup menggembirakan dimana pegawai dengan SK definitif meningkat menjadi 30 orang dan yang masih dengan nota dinas tinggal 2 orang. Pada tahun 1997 juga diangkat dua orang pegawai atas nama I Made Darma Suteja, S. S. dan Elies Setiyawati, S.S. Guna memperlancar tugas-tugas kantor pada tahun ini juga diangkat 5 orang karyawan honorer, Dra. Ida Ayu Wirasmini Sidemen, I Wayan Suca Sumadi, SH., I Nyoman Suita, Luh Gede Puriani, I Made Astrawan dan I Made Wiadnyana. Pengangkatan pegawai tahap kedua pada tahun 1998 sebanyak tiga orang atas nama Hartono, S.S., Anak Agung Gde Rai Gria, S.S., dan Raj. Riana Dyah Prawitasari, S. Si. Di samping pengangkatan tenaga baru pada tahun 1998 juga ada satu karyawan pindahan dari BKSNT Pontianak Drs. I Made Satyananda. Pengangkatan pegawai tahap ketiga pada tahun 1999 atas nama Nuryahman, S.S. dan pengangkatan pegawai tahap keempat pada tahun 2000 atas nama I Ketut Sudarma Putra, S.S. Untuk lebih jelas mengenai gambaran jumlah pegawai sampai tahun 2000 dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2**  
**Keadaan Pegawai BKSNT Denpasar Tahun 2000**

NO.	NAMA	GOL.	JABT./PANGK.	KETERANGAN
1.	Dra. S. Swarsi NIP 13030076	IV/a	Kepala BKSNT Dps Pembina	Kepala Definitif
2.	Drs. I Made Purna NIP 13175456	III/d	Kasubag TU Penata Tk. I	Kasubag T. U. Definitif
3.	Dra. Cok. Istri Suryawati NIP 131271088	III/d	Asisten Penl. Madya Penata Tk. I	KetuaKlp. Sejarah
4.	Drs. I Wayan Namiarta NIP 131628192	III/d	Pembantu Pimpinan. Penata Tk. I	KetuaKlp. Dokt. Pubk.
5.	Dra. Ni Made Sujiti NIP 131253046	III/c	Pembantu Pimpinan Penata	Pimpro P2NB
6.	Drs. I Wayan Rupa NIP 131871165	III/c	Asisten Penl. Muda Penata	Tenaga TeknisKlp. Lingk. Budaya
7.	Drs. I Wayan Sudarma NIP 131637973	III/c	Asisten Penl. Muda Penata	Tenaga Teknis Klp. Lingk. Budaya

8.	Dra. I Gst. Ayu Armini NIP 131875425	III/c	Asisten Penl. Muda Penata	Tenaga TeknisKlp. Lingk. Budaya
9.	Drs. I Made Sumerta NIP 131964598	III/c	Asisten Penl. Muda Penata	Tenaga TeknisKlp. Tradisi
10.	Drs. I Made Satyananda NIP 131947683	III/c	Asisten Penl. Muda Penata	Tenaga TeknisKlp. Tradisi
11.	Dra. Ni Luh Ariani NIP 132010823	III/b	Pembantu Pimpinan Penata Muda Tk. I	Tenaga TeknisKlp. Tradisi
12.	Ni Luh Widasih, B.A. NIP 130786101	III/b	Pembantu Pimpinan Penata Muda Tk. I.	KetuaKlp. Perpustakaan
13.	Drs. I. B. Nym. Reditia NIP 131116363	III/b	Pembantu Pimpinan Penata Muda Tk. I	Tenaga TeknisKlp. Tradisi
14.	I Rai Suanda, S. Sos. NIP 130610847	III/b	Pembantu Pimpinan Penata Muda	Ketua Klp. Urusan Dalam
15.	Ni Made Sumiasih NIP 130804562	III/a	Pembantu Pimpinan Penata Muda	Klp. KeuanganBendahara
16.	I Dw. Ayu Nym. Seniari NIP 130792033	III/a	Pembantu Pimpinan Penata Muda	Klp. Kepegawaian
17.	I Made Lodra NIP 130871389	III/a	Pembantu Pimpinan Penata Muda	KetuaKlp. Keuangan
18.	I Wayan Piada NIP 130913184	III/a	Pembantu Pimpinan Penata Muda	Klp. Urusan Dalam
19.	I Made Suarsana, S.H. NIP 131903704	III/a	Pembantu Pimpinan Penata Muda	Tenaga TeknisKlp. Lingk. Budaya
20.	Elies Setyawati, S.S. NIP 132174498	III/a	Pembantu Pimpinan Penata Muda	Tenaga TeknisKlp. Sejarah
21.	I Made Dharma Suteja, S.S. NIP 132174499	III/a	Pembantu Pimpinan Penata Muda	Tenaga TeknisKlp. Lingk. Budaya
22.	Hartono, S.S. NIP 132206631	III/a	Pembantu Pimpinan Penata Muda	Tenaga TeknisKlp. Tradisi
23.	A. A. Gde Rai Geria, S.S. NIP 132206630	III/a	Pembantu Pimpinan Penata Muda	Klp. Perpustakaan
24.	Ashari, S. Sos. NIP 130922820	III/a	Pembantu Pimpinan Penata Muda	Klp. Dok. Publ.
25.	I Wayan Sukadana, B.A. NIP 131600004	III/a	Pembantu pimpinan Penata Muda	Klp. Kepegawaian

26.	Raj. R. Dyah Prawitasari, S. Si NIP 132206909	III/a	Pembantu Pimpinan Penata Muda	Tenaga TeknisKlp. Lingk. Budaya
27.	Nuryahman, S.S. NIP 132233990	III/a	Pembantu Pimpinan Penata Muda	Tenaga TeknisKlp. Sejarah
28.	I Ketut Sudarma Putra, S.S. NIP 132257901	III/a	Pembantu Pimpinan Penata Muda	Klp. Perpustakaan
29.	I Made Sedana, B.A. NIP 131864344	II/d	PelaksanaPengatur Tk. 1	Klp. Perpustakaan
30.	I Wayan Rudita NIP 131478031	II/d	PelaksanaPengatur Tk. 1	Klp. Kepegawaian
31.	I Gst. Nyoman Durawan NIP 130804560	II/d	PelaksanaPengatur Tk. 1	Klp. Urusan Dalam
32.	I Ketut Sukada NIP 131118480	II/d	PelaksanaPengatur Tk. 1	Klp. Urusan Dalam
33.	I Putu Sudarsana NIP 131432816	II/b	PelaksanaPengatur Muda Tk. 1	Klp. Urusan Dalam
34.	I Made Sumitra NIP 131116359	II/b	PelaksanaPengatur Muda Tk. 1	Klp. Urusan Dalam
35.	I Made Deyana NIP 131904106	II/b	PelaksanaPengatur Muda Tk. 1	Klp. Keuangan
36.	I Gede Yasa Wardana NIP 131905076	II/a	PelaksanaPengatur Muda	Staf Proyek P2NB

Sumber: Data Kepegawaian BKSNT Denpasar Tahun 2000

Untuk memperlancar tugas-tugas di kantor, pada tahun 2000 ada 5 orang tenaga honorer yakni; I Wayan Suca Sumadi, S.H., I Nyoman Suita, Luh Gde Puriani, I Made Budiasa, dan I Made Wiadnyana. Mereka bertugas sebagai Satpam, bagian kebersihan, dan pengelola koperasi.

Tahun 2001 masa akhir kepemimpinan Ibu Dra. S. Swarsi, ada satu orang pegawai yang pindah atas nama Elies Setyawati, S.S. terhitung sejak 1 Januari 2001 ke SLTP Negeri 2 Delanggu Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah. Pada tahun ini juga ada dua pegawai pindahan atas nama I Made Sumarja, S.S. dari BKSNT Papua, dan Damardjati Kun Marjanto, S. Sos. dari BKSNT Pontianak.

Adanya pegawai yang keluar dan masuk ini sehingga sampai akhir tahun 2001 jumlah pegawai sebanyak 35 orang, dan pegawai honorer sebanyak 5 orang.

Hasil yang telah dicapai oleh Balai dari tahun 1996-2002 adalah kebanyakan berupa hasil penelitian serta kegiatan-kegiatan lainnya seperti seminar, diskusi, lomba serta penerbitan. Menurut data yang ada bahwa hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebanyak 45 judul, namun kajiannya lebih banyak dilakukan di daerah Bali. Untuk tahun-tahun mendatang diharapkan Balai mampu untuk melakukan kajian yang lebih banyak keluar Bali seperti di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Disamping hasil penelitian/kegiatan di atas, BKSNT Denpasar juga telah mampu menjalin kemitraan dengan instansi terkait yang ada di Bali yaitu dengan Pemda Badung, Pemda Kota Denpasar, Pemda Gianyar, Pemda Propinsi Bali (Dinas Kebudayaan Propinsi Bali) dan lain sebagainya. Khusus dalam hal kegiatan rutin dan merupakan kegiatan penting di Bali yaitu PKB (Pesta Kesenian Bali) yang diselenggarakan tiap bulan Juni-Juli, BKSNT Denpasar sudah mampu ikut di dalamnya sebagai Panitia Penyelenggara Sarasehan.<sup>17</sup>

Kepemimpinan Ibu Dra. S. Swarsi yang dipegang sejak tanggal 12 Nopember 1996 kemudian berakhir dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: 14/BKSNT/C.28/2002 hari Jumat tanggal 1 Pebruari 2002 bertempat di Aula Dinas Kebudayaan Propinsi Bali.<sup>18</sup> Bahwa pihak pertama (Dra. S. Swarsi) telah mengadakan serah terima Jabatan Kepala BKSNT Denpasar kepada pihak kedua (Drs. I Made Purna) dimana pihak pertama telah memilih menjadi tenaga fungsional peneliti pada instansi yang sama. Pihak kedua menerima penyerahan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama menyerahkan segala kewenangan Jabatan Kepala BKSNT Denpasar termasuk seluruh berkas dan barang inventaris yang ada kepada pihak kedua.
2. Selanjutnya atas segala serah terima yang telah berlangsung tersebut, tanggungjawab kewenangan sepenuhnya berada pada pihak kedua.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, pp. 9-12.

<sup>18</sup> Lihat, Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: 14/BKSNT/C.28/2002.

Bapak Drs. I Made Purna selaku Kasubag TU sejak 5 Nopember 1996 sampai 1 Pebruari 2002 telah mengantarkan BKSNT Denpasar ke pintu gerbang yang sukses. Pemikiran-pemikiran, ide-ide serta tenaga yang beliau sumbangkan demi kemajuan balai sangat berarti. Beliau terus berkarya demi kemajuan Balai Kajian Jarahnitra Denpasar.

Tibalah saatnya pada tanggal 1 Pebruari 2002 masa jabatan Ibu Dra. S. Swarsi sebagai Kepala Balai Kajian dan Bapak Drs. I Made Purna sebagai Kasubag TU berakhir. Selanjutnya Ibu Dra. S. Swarsi masih tetap bekerja di BKSNT Denpasar dengan tugas barunya sebagai tenaga fungsional peneliti yang paling senior diantara staf fungsional yang ada. Bahkan beliau ditunjuk sebagai koordinator kelompok fungsional. Kami mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang beliau berikan selama menjabat sebagai Kepala Balai. Tenaga, pikiran dan waktu yang telah diluangkan untuk kemajuan BKSNT sangat berarti demi kelanjutan Balai ke depan.

Keberhasilan Bapak Drs. I Made Purna telah teruji selama menjabat sebagai Kasubag TU selama lebih kurang lima setengah tahun. Keuletan dan prestasi kerja yang dimiliki ini mengantarkan beliau kekarir yang lebih tinggi dengan diangkatnya sebagai Kepala Balai definitif yang kedua, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP. 33/BP-BUDPAR/2002 tanggal 31 Januari 2002. Pelantikan dilakukan oleh Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Bapak Dr. I Gusti Ngurah Anom di Aula Dinas Kebudayaan Propinsi Bali pada tanggal 1 Pebruari 2002.<sup>19</sup> Pelantikan dan sumpah jabatan disaksikan oleh Dra. I Gusti Ayu Rai Arnita (Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi Bali) dan Dr. Haris Sukendar (Kepala Pusat Penelitian Arkeologi). Keberhasilan yang sama juga dialami oleh salah satu staf fungsional dari kelompok sejarah yakni Ibu Dra. Cok. Istri Suryawati, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pariwisata Nomor KEP. 95/BP-BUDPAR/2002 tanggal 31 Januari 2002 telah diangkat dalam jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada BKSNT Denpasar, dan telah dilantik oleh Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Bapak Dr. I Gusti Ngurah Anom pada tanggal 1 Pebruari 2002 di Aula Dinas Pendidikan Propinsi Bali. Selain pelantikan Kepala dan Kasubag TU BKSNT Denpasar di tempat yang sama juga dilantik

---

<sup>19</sup> Lihat, *Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: KP. 103/III/14/BP-BUDPAR/2002.*

beberapa Kepala dan Kasubag TU UPT lain di lingkungan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Propinsi Bali.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh Bapak Drs. I Made Purna dan Ibu Dra. Cok. Istri Suryawati selaku pimpinan yang baru untuk memajukan Balai adalah masih tetap melanjutkan program-program kerja yang dirintis oleh pendahulunya. Di dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan maka strategi kebijaksanaan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi Kelembagaan, yakni dengan cara mensosialisasikan Balai Kajian terutama kepada instansi terkait di tiga wilayah kerja Balai yaitu Propinsi Bali, NTB, dan NTT.
2. Pengembangan SDM melalui program bimbingan teknis penelitian, diklat-diklat teknis berjenjang, menempuh program S2, kerjasama dengan perguruan tinggi, kerjasama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) dan Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI).
3. Menyeimbangkan wawasan teoritis dan implemented (keterbukaan). Walaupun BKSNT lebih banyak menangani kebudayaan yang bersifat intangible dan abstrak, sehingga pemahaman konsep, teori dan kerangka berpikir menjadi prioritas utama. Namun dari hasil kajian tersebut harus mampu dijadikan bahan untuk menyusun kebijakan kebudayaan, bukan hanya untuk BKSNT sendiri namun juga mampu dioperasionalkan oleh instansi lain yang memerlukan.
4. Networking Kelembagaan. Orientasi kedepan BKSNT Denpasar harus mampu menjalin kerjasama dengan instansi-instansi diluar jalur vertikal (BP Budpar), seperti dinas-dinas terkait yang ada di tingkat propinsi dan kabupaten/kota. Agar diterima oleh instansi di luar jalur vertikal, maka seluruh PNS yang ada di BKSNT Denpasar harus profesional dalam kegiatan penelitian.
5. Pengembangan Fasilitas. Untuk mencapai cita-cita ideal tersebut di atas maka harus ditunjang oleh prasarana dan sarana yang memadai, mulai dari gedung, penunjang teknis fungsional harus lengkap.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Lihat. *Renstra BKSNT Denpasar.....*, op. cit., p. 59.



Langkah-langkah yang ditempuh untuk kemajuan BKSNT kedepan seperti terurai di atas juga berpijak pada Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.52/OT/001/MKP/2003, tentang Organisasi dan Tatakerja BKSNT, Bab I pasal 2, yakni melaksanakan pelestarian kebudayaan yang mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pendokumentasian aspek-aspek tradisi kepercayaan, kesenian dan kesejarahan. Bab I pasal 2, Balai Kajian menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyusunan rencana dan program; pengkajian terhadap aspek-aspek kebudayaan dan kesejarahan; pengembangan hasil-hasil kajian; pelaksanaan pengemasan hasil-hasil kajian dan pemanfaatannya; pendokumentasian dan penyebarluasan informasi; perlindungan kebudayaan; pelayanan public dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Kajian. Bab III pasal 8, Kepala Balai wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun dengan instansi di luar Balai Kajian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.<sup>21</sup> Mudah-mudahan dengan strategi yang ditempuh ini BKSNT Denpasar kedepan semakin menunjukkan prestasi yang lebih baik.

Satu hal yang patut diingat bahwa pada masa kepemimpinan Bapak Drs. I Made Purna, BKSNT Denpasar terpukul serta berduka karena dua orang karyawan telah meninggal dunia yakni Bapak Drs. Ida Bagus Nyoman Reditia pada tanggal 12 Januari 2003, dan Bapak Ashari, S. Sos. pada tanggal 1 September 2003. Almarhum Bapak Drs. I. B. Reditia telah diupacarai secara Agama Hindu (diaben) di Desa Baha Kecamatan Mengwi. Sedangkan almarhum Bapak Ashari, S. Sos. dimakamkan sesuai dengan agama Islam di pemakaman muslim Kampung Jawa di Denpasar. BKSNT Denpasar telah ditinggal oleh dua staf untuk selamalamanya. Semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.

Namun ada juga prestasi yang membanggakan di tahun 2003 yakni salah satu karyawan telah menyelesaikan studi S2/Pasca Sarjana di Universitas Udayana atas nama I Made Dharma Suteja, S.S. Sedangkan di tahun 2004 Bapak Drs. I Made Purna juga telah menyelesaikan studi S2 di tempat yang sama. Sampai saat ini pegawai BKSNT Denpasar yang berpendidikan S2 baru dua orang saja. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang karyawan lain mengikuti jejak-jejak beliau berdua sehingga SDM yang dimiliki semakin meningkat.

---

<sup>21</sup> Lihat, *Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.52/OT.001/MKP/2003*.

Berdasarkan data kepegawaian dari tingkat pendidikan, golongan dan pangkat, pegawai BKSNT Denpasar sampai bulan Mei 2004 terdiri dari 34 orang pegawai dengan ketentuan pendidikan setingkat SMU ada 10 orang (29%), Sarjana Muda 3 orang (9%), Sarjana (S1) sebanyak 20 orang (59%) dan tingkat Pasca Sarjana (S2) hanya 1 orang (3%). Dari 34 orang pegawai definitif terdiri dari 8 orang perempuan (24%) dan 26 orang laki-laki (76%). Sedangkan tenaga honorer ada 6 orang, sehingga jumlah karyawan seluruhnya sebanyak 40 orang. Untuk lebih jelas mengenai keadaan pegawai definitif di BKSNT Denpasar sampai Bulan Mei 2004 dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3**  
**Tingkat Pendidikan Pegawai BKSNT Denpasar Menurut Golongan**  
**Bulan Mei 2004**

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN								JMLH	%	
		II				III						IV
		a	B	c	d	A	b	c	d			
1.	SMU	-	-	2	-	4	4	-	-	-	10	29%
2.	Sarjana Muda	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	9%
3.	Sarjana (S1)	-	-	-	-	3	6	7	2	2	20	59%
4.	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3%
<b>JUMLAH</b>		-	-	2	-	8	12	8	2	2	34	100%

*Sumber: Data Kepegawaian BKSNT Denpasar Tahun 2004*

Perlu dikemukakan di sini bahwa pegawai BKSNT Denpasar sebenarnya sudah ada yang menyelesaikan pendidikan S1 terutama karyawan bagian keuangan dan urusan kepegawaian. Begitu juga ada yang telah menyelesaikan studi S2 di tahun 2004. Namun mereka ini belum di proses penyesuaian pangkatnya atau belum ujian dinas sehingga akan terlihat perbedaan dengan tabel 3 bila dilihat secara kenyataan pendidikan yang dimiliki oleh pegawai BKSNT Denpasar sekarang ini. Pendidikan setingkat SMU sebanyak 6 orang, Sarjana Muda 3 orang, Sarjana (S1) sebanyak 23 orang dan pendidikan Pasca

Sarjana (S2) ada 2 orang. Berdasarkan klasifikasi jenis pendidikan yang dimiliki BKSNT Denpasar dapat dirinci sebagai berikut:

1. S2 Kajian Budaya = 2 orang
  2. S1 Antropologi = 5 orang
  3. S1 Sejarah = 3 orang
  4. S1 Geografi = 1 orang
  5. S1 Sastra Indonesia = 4 orang
  6. S1 Sastra Daerah = 3 orang
  7. S1 Hukum = 1 orang
  8. S1 Administrasi = 6 orang
  9. Sarjana Muda = 3 orang
  10. SMTA = 6 orang
- JUMLAH = 34 orang**

Keadaan pegawai BKSNT Denpasar tahun 2004 berdasarkan pangkat, jabatan dan golongan secara lebih jelas bisa dilihat dalam tabel 4, sedangkan mengenai pegawai honorer bisa dilihat pada tabel 5 dibawah ini.

**Tabel 4**  
**Keadaan Pegawai BKSNT Denpasar Berdasarkan**  
**Jabatan/Pangkat dan Golongan Tahun 2004**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN/PANGKAT	GOL.
1.	Drs. I Made Purna NIP 131754561	Kepala BKSNT Denpasar Pembina	IV/a
2.	Dra. Cok. Istri Suryawati NIP. 131271088	Kasubag TU Penata Tk. I	III/d
3.	Dra. S. Swarsi NIP. 130300768	Peneliti Muda Pembina	IV/a
4.	Drs. I Wayan Namiartha NIP. 131628192	Pembantu Pimpinan Penata Tk. I	III/d
5.	Drs. I Wayan Rupa NIP. 131871165	Ajun Peneliti Muda Penata	III/c

6.	Drs. I Wayan Sudarma NIP. 131637973	Asisten Peneliti Muda Penata	III/c
7.	Dra. Gst. Ayu Armini NIP. 131875425	Asisten Peneliti Muda Penata	III/c
8.	Drs. I Made Sumerta NIP. 131964598	Asisten Peneliti Muda Penata	III/c
9.	Drs. I Made Satyananda NIP. 131947683	Asisten Peneliti Madya Penata	III/c
10.	Dra. Ni Luh Ariani NIP. 132010823	Pembantu Pimpinan Penata	III/c
11.	Ni Luh Widasih, BA. NIP. 130786101	Pembantu Pimpinan Penata	III/c
12.	I Rai Suanda, S. Sos. NIP. 130610847	Pembantu Pimpinan Penata	III/c
13.	I Made suarsana, S.H. NIP. 131903704	Asisten Peneliti Muda Penata Muda Tk. I	III/b
14.	Ni Made Sumiasih, S. Sos. NIP. 130804562	Pembantu Pimpinan Penata Muda Tk. I	III/b
15.	I Dewa Ayu Nyoman Seniari NIP. 130792033	Pembantu Pimpinan Penata muda Tk. I	III/b
16.	I Made Lodra, S. Sos. NIP. 130871389	Pembantu Pimpinan Penata Muda Tk. I	III/b
17.	I Wayan Piada NIP. 130913184	Pembantu Pimpinan Penata Muda Tk. I	III/b
18.	I Made Dharma Suteja, M. Si. NIP. 132174499	Asisten Peneliti Muda Penata Muda Tk. I	III/b
19.	Damardjati Kun. Marjanto, S. Sos. NIP. 132174509	Asisten Peneliti Muda Penata Muda Tk. I	III/b
20.	Hartono, S.S. NIP. 132206631	Pembantu Pimpinan Penata Muda Tk. I	III/b
21.	Nuryahman, S.S. NIP. 132233990	Pembantu Pimpinan Penata Muda Tk. I	III/b

22.	I Wayan Sukadana, BA NIP. 131600004	Pembantu Pimpinan Penata Muda Tk. I	III/b
23.	A.A. Gde Rai Gria, S.S. NIP. 132206630	Pembantu Pimpinan Penata Muda Tk. I	III/b
24.	Raj. Riana Dyah Prawitasari, S. Si. NIP. 132206909	Pembantu Pimpinan Penata Muda Tk. I	III/b
25.	I Ketut Sudharma Putra, S.S. NIP. 132257901	Pembantu Pimpinan Penata Muda	III/a
26.	I Made Sumarja, S. S. NIP. 132206640	Pembantu Pimpinan Penata Muda	III/a
27.	I Made Sedana, BA. NIP. 131864344	Pembantu Pimpinan Penata Muda	III/a
28.	I Wayan Rudita, S. Sos. NIP. 131478031	Pembantu Pimpinan Penata Muda	III/a
29.	I Gede Yasa Wardana, S. Sos. NIP. 131905076	Pembantu Pimpinan Penata Muda	III/a
30.	I Gst. Nyoman Durawan NIP. 130804560	Pembantu Pimpinan Penata Muda	III/a
31.	I Ketut Sukada NIP. 131118480	Pembantu Pimpinan Penata Muda	III/a
32.	I Made Deyana, S. Sos. NIP. 131904106	Pembantu Pimpinan Penata Muda	III/a
33.	I Putu Sudarsana NIP. 131432816	PelaksanaPengatur	II/c
34.	I Made Sumitra NIP. 131116359	PelaksanaPengatur	II/c

Sumber: Data Kepegawaian BKSNT Denpasar Tahun 2004.

**Tabel 5**  
**Daftar Pegawai Honorer Tahun 2004**

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	I Wayan Suca Sumadi, SH.	Honorer sejak 1997
2.	Ni Luh Gede Puriani	Honorer sejak 1997
3.	I Made Budiasa	Honorer sejak 1999
4.	Kadek Budiarta	Honorer sejak 2001
5.	Ida Bagus Sujapa, S.S.	Honorer sejak 2004
6.	Ketut Edi Parwita	Honorer sejak 2004

*Sumber: Data Kepegawaian BKSNT Denpasar Tahun 2004.*

Perkembangan pegawai sejak Kantor BKSNT Denpasar didirikan selalu mengalami perubahan-perubahan. Hal ini diakibatkan oleh adanya pegawai yang pindah, pengangkatan pegawai baru maupun pegawai yang meninggal. Lebih jelasnya mengenai perkembangan pegawai dari tahun 1996 sampai tahun 2004 dapat dilihat dalam tabel 6 di bawah ini.

**Tabel 6**  
**Perkembangan Jumlah Pegawai BKSNT Denpasar**  
**Dari Tahun 1996 – 2004**

No	Tahun	SK Definitif	Nota Dinas	PLH	Ket. Lain	Honor	Jmlh
1.	1996	4	20	1	-	-	25
2.	1997	28	2	-	Diangkat 2	6	38
3.	1998	33	-	-	Keluar 2Diangkat 3	5	39
4.	1999	34	-	-	Diangkat 1	5	40
5.	2000	35	-	-	Diangkat 1	5	41
6.	2001	36	-	-	Keluar 2Masuk 2	5	41
7.	2002	36	-	-	-	5	41
8.	2003	36	-	-	Meninggal 2	5	39
9.	2004	34	-	-	-	6	40

*Sumber: Data Kepegawaian BKSNT Denpasar Tahun 1996 – 2004.*

Secara akademis pendidikan yang dimiliki oleh karyawan BKSNT Denpasar mayoritas dengan gelar sarjana S1. Namun didalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan perlu kiranya mendapatkan pendidikan yang bersifat non akademis seperti diklat-diklat yang diselenggarakan oleh Balai Kajian sendiri maupun oleh pusat di Jakarta. Pelatihan-pelatihan/diklat ini bertujuan untuk menambah wawasan atau ilmu sehingga didalam melaksanakan tugas-tugas menunjukkan prestasi yang lebih baik. Dalam pelatihan atau diklat juga diperoleh pengalaman dari teman-teman yang berasal dari BKSNT se Indonesia maupun dari berbagai instansi di seluruh Indonesia.

Beberapa diklat yang pernah diikuti oleh karyawan BKSNT Denpasar sejak didirikan tahun 1996 meliputi diklat Adum, Spama, Teknis, Keuangan dan Kepegawaian. Diklat Adum pernah diikuti oleh Bapak Drs. I Made Purna pada tanggal 13 Januari sampai 16 Pebruari 2000 di Jakarta, lulus dengan predikat baik sekali.<sup>22</sup> Ibu Dra. Cok Istri Suryawati juga sudah pernah mengikuti Diklat Adum pada tanggal 10 Juni sampai dengan 10 Juli 2002 di Wisma PHI Jakarta. Diklat Spama baru dilakukan oleh Bapak Drs. I Made Purna dengan lulus predikat baik sekali pada Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama (Diklat SPAMA) Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Angkatan VII yang diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 28 Juni sampai 16 Agustus 2002.<sup>23</sup>

Pada tahun 1998 diadakan Pelatihan Tenaga Teknis Bidang Kebudayaan oleh pemerintah pusat di Yogyakarta. Pelatihan ini diikuti oleh Drs. I Made Sumerta, Drs. I Made Satyananda dan Dra. Cok Istri Suryawati. Pelatihan Tenaga Program Tingkat Lanjutan dalam rangka Pengembangan Sistem Informasi Kebudayaan diikuti oleh Hartono, S.S., pada tahun 1998 dan tahun 1999. Tahun 2000 diadakan Pelatihan Tenaga Teknis Tradisi dan Kepercayaan di Jakarta yang diikuti oleh Drs. I Wayan Sudarma. Pelatihan yang sejenis juga diikuti oleh Anak Agung Gde Rai Gria, S.S. di Jakarta pada tahun 2002. Pelatihan oleh kelompok sejarah adalah Pelatihan Tenaga Teknis Kesejarahan tahun 2001 di laksanakan di Bogor diikuti oleh Nuryahman, S.S. dan I Made Sumarja, S.S.

---

<sup>22</sup> Untuk lebih jelas lihat, *Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 795/ADUM/LAN/1999*.

<sup>23</sup> Untuk lebih jelas lihat, *Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 20973/SPAMA/LAN/2002*.

Pelatihan Kesejarahan ini berlanjut tahun 2002 dan tahun 2003 di Bogor. Damardjati Kun Marjato, S. Sos., (Kelompok Pengkajian Tradisi) pada tahun 2003 juga dikirim untuk mengikuti Pelatihan Tenaga Teknis Tradisi dan Kepercayaan di Bogor. Pelatihan lain seperti bagian kepegawaian pernah diikuti oleh I Wayan Rudita, S. Sos. di Jakarta.

Pelatihan teknis, seminar, dan diskusi juga diselenggarakan oleh Balai Kajian sendiri bekerjasama dengan Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Udayana Denpasar, MSI Cabang Bali dan Instansi lain di Denpasar. Secara rutin Balai kajian Denpasar juga melaksanakan acara bedah proposal dan evaluasi akhir hasil penelitian dengan mendatangkan para pakar dari Program Pascasarjana Kajian Budaya Udayana seperti Bapak Prof. Dr. I Gde Parimarta, Prof. Dr. A. A. Putra Agung, Dr. Emiliana Maria dan pakar yang lainnya.

Semua kegiatan yang dilaksanakan diharapkan memperoleh hasil/manfaat guna menambah pengalaman, pengetahuan untuk meningkatkan prestasi kerja. Diklat atau kegiatan lainnya sangat menunjang peningkatkan SDM di Balai Kajian Denpasar sehingga untuk kedepan Balai Kajian Denpasar kualitasnya semakin baik.

Suatu kebanggaan yang diperoleh oleh beberapa karyawan BKSNT Denpasar adalah dengan diberikannya penghargaan oleh pemerintah karena jasa-jasanya yang telah mengabdikan kepada Negara Republik Indonesia selama beberapa tahun, berupa Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 7 di bawah ini.



**Tabel 7**  
**Tanda Kehormatan Yang Diberikan Oleh Pemerintah**  
**Kepada Pegawai BKSNT Denpasar**

No.	Nama	Jenis Penghargaan	Diterima Th.
1.	Dra. S. Swarsi	Satya Lencana Karya Satya (30 Th.)	1999
2.	Drs. I Made Purna	Satya Lencana Karya Satya (10 Th.)	2003
3.	Dra. Cok Istri Suryawati	Satya Lencana Karya Satya (10 Th.)	2003
4.	Drs. I Wayan Rupa	Satya Lencana Karya Satya (10 Th.)	2003
5.	I Wayan Sukadana, B.A.	Satya Lencana Karya Satya (10 Th.)	2003
6.	Ni Luh Widasih, B.A.	Satya Lencana Karya Satya (20 Th.)	2003
7.	I Rai Suanda, S. Sos.	Satya Lencana Karya Satya (10 Th.)	2001
8.	Ni Made Sumiasih, S. Sos.	Satya Lencana Karya Satya (10 Th.)	2002
9.	I Dewa Ayu Nyoman Seniari	Satya Lencana Karya Satya (10 Th.)	2002
10.	I Made Lodra, S. Sos.	Satya Lencana Karya Satya (10 Th.)	2002
11.	I Wayan Piada	Satya Lencana Karya Satya (20 Th.)	2002
12.	I Wayan Rudita, S. Sos.	Satya Lencana Karya Satya (10 Th.)	2002
13.	I Ketut Sukada	Satya Lencana Karya Satya (10 Th.)	1998
14.	I Made Sumitra	Satya Lencana Karya Satya (10 Th.)	1998

Sumber: Data Kepegawaian BKSNT Denpasar Tahun 2004

Menunjuk Surat Nomor: KP. 107/1/3/Ses Men/KKP/04 Tanggal 21 Januari 2004, ada beberapa pegawai BKSNT Denpasar yang diusulkan untuk memperoleh Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Usulan ini berdasarkan Surat Kepala Balai Nomor: 44/SB/BKSNT/9.III/2003 atas nama sebagai berikut:

1. Drs. I Wayan Sudarma
2. Dra. I Gusti Ayu Armini
3. Dra. Ni Luh Ariani
4. I Made Suarsana, S.H.
5. I Putu Sudarsana
6. Drs. I Made Sumerta
7. I Gusti Nyoman Durawan

8. I Made Deyana, S. Sos.
9. I Gede Yasa Wardana, S. Sos.
10. I Made Sedana, B. A.<sup>24</sup>

Usulan untuk memperoleh penghargaan di atas sudah diberikan oleh pemerintah RI berdasarkan KEPRES RI NO. 048/TK/TAHUN 2004 tanggal 5 Agustus 2004, dan telah diterima oleh pegawai yang bersangkutan pada tanggal 17 Agustus 2004 dalam peringatan HUT ke-59 Proklamasi Kemerdekaan RI di BKSNT Denpasar. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya diserahkan oleh Ka. Subag TU Dra. Cok Istri Suryawati.

### **3.5 Sarana dan Prasarana**

#### **3.5.1 Pengadaan Tanah.**

Pendirian UPT bidang kebudayaan yakni BKSNT Denpasar sudah barang tentu sangat memerlukan tempat yang cocok. Oleh sebab itu, prasarana utama yang sangat dibutuhkan adalah tanah sebagai tempat pembangunan gedung. Guna keperluan sarana pertama ini maka kebutuhan akan tanah tersebut dituangkan dalam petunjuk oprasional (PO) Nomor: 6482/F1.1/B.1993 tanggal 18 Maret 1993 bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Bali tahun anggaran 1993/1994.<sup>25</sup>

Pengadaan tanah untuk gedung BKSNT Denpasar juga didasarkan atas Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 tahun 1985. Dalam tatacara pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lokasi proyek harus sesuai dengan rencana penggunaan tanah atau rencana pembangunan pemerintah setempat.
2. Harga tanah harus memadai dalam arti yang paling menguntungkan bagi negara dan harga tanah harus sesuai dengan proyek pembangunan di daerah yang bersangkutan dan atau didaerah yang berbatasan dalam tahun anggaran yang sama.
3. Sedapat mungkin dihindarkan penggunaan tanah pertanian yang subur.

---

<sup>24</sup> Surat Kepala BKSNT Denpasar Nomor: 44/SB/BKSNT/9.III/2004, perihal usulan untuk memperoleh Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya.

<sup>25</sup> Elies Setiyawati, S. S., (dkk.), "Sejarah Berdirinya Balai Kajian Jarahnitra Denpasar", (Denpasar: Naskah belum diterbitkan, 1988/1999), p. 7.

#### 4. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.<sup>26</sup>

Pengadaan tanah dilakukan oleh Drs. Ida Bagus Mayun atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (selaku pembeli) kepada penjual I Gusti Ngurah Bagus Suryadana yang diketahui oleh Pekaseh Subak Saih I Ketut Rangkep dan Kepala Desa Dalung I Gede Kawijaya, B. Sc. Tanah yang lokasinya di Jalan Abian Base Dalung seluas 2.750 M<sup>2</sup>.<sup>27</sup> Tanah juga dibeli dari I Gusti Ngurah Alit Satriawan oleh Drs. I. B. Mayun atas nama Departemen pendidikan dan Kebudayaan (pembeli) yang juga diketahui oleh Pekaseh Subak Saih I Ketut Rangkep dan Kepala Desa Dalung I Gede Kawijaya, B. Sc. Dengan luas tanah 250 M<sup>2</sup>.<sup>28</sup> Jadi tanah seluruhnya yang dimiliki untuk pembangunan Kantor BKSNT Denpasar adalah 3.000 M<sup>2</sup> semuanya berlokasi di Jalan Abian Base, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

#### 3.5.2 Pengadaan Kantor

Setelah memperoleh tanah sebagai tempat pembangunan kantor yang nantinya dijadikan tempat pelaksanaan tugas sehari-hari maka dibangunlah 3 unit bangunan yang dibiayai oleh Proyek P2NB Bali tahun 1995/1996. Ketiga bangunan ini seluas 840 M<sup>2</sup> dengan konstruksi permanen. Biaya yang dihabiskan untuk 3 unit gedung tersebut sebesar Rp. 460.000.000. Unit pertama terletak paling depan yang difungsikan sebagai ruang kerja Kepala Bali, Kepala Tata Usaha, ruang kerja bagian administrasi, ruang tamu dan ruang komputer. Gedung kedua berada paling tengah (dibelakang gedung pertama) difungsikan untuk ruang operasionalisasi Kantor BKSNT Denpasar seperti ruang kepegawaian, ruang proyek, ruang keuangan, ruang kelompok tradisi dan kepercayaan, kelompok sejarah, kelompok lingkungan budaya, kelompok nilai budaya dan ruang untuk pertemuan. Unit yang ketiga berada paling belakang (bagian barat) dengan konstruksi gedung bertingkat dua. Lantai bagian atas adalah ruang aula yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan yang jumlah

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, pp. 8-9.

<sup>27</sup> Untuk lebih jelas lihat, *Badan Pertanahan Nasional, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 19 Mei 1997, AJ. 021697 22.03.04.01.4.00002.*

<sup>28</sup> Untuk lebih jelas lihat, *Badan Pertanahan Nasional, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 19 Mei 1997 AJ. 021698 22.03.04.01.4.00003..*

pesertanya agak banyak seperti ceramah, diskusi, seminar dan kegiatan yang lainnya. Lantai bagian bawah terdiri dari 4 ruangan yang digunakan untuk ruang perpustakaan, koperasi karyawan, mes penjaga malam dan ruang gudang.

Tahun anggaran 1998/1999 Bagian Proyek P2NB Bali membangun satu unit gedung lagi seluas 62 M<sup>2</sup> dengan konstruksi permanen. Gedung ini rencananya difungsikan untuk ruang wisma. Pembangunan gedung menghabiskan biaya Rp. 43. 000. 000. Wisma ini lokasinya menjadi satu dengan bangunan yang ketiga (berhimpitan).<sup>29</sup> Untuk kenyamanan parkir mobil pada tahun 2002 dibangun sarana parkir semi permanen di bagian paling barat.

### **3.5.3 Inventaris Kantor**

Sarana yang sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas pokok balai sebagai pelestarian kebudayaan yang mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pendokumentasian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian dan kesejarahan adalah sarana komputer atau mesin tulis, scanner, kamera, hendycome, tape recorder dan peralatan yang lainnya. Sarana ini sangat membantu dalam kegiatan penelitian, pendokumentasian, seminar dan pencetakan hasil-hasil penelitian. Perlengkapan lain yang juga sangat menunjang kegiatan di kantor seperti meja dan kursi kerja, almari dan inventaris yang lainnya. Untuk kenyamanan kantor juga dipasang hiasan berupa seni lukis, seni pahat serta untuk kenyamanan kerja beberapa ruangan dipasang AC dan kipas angin. Untuk lebih jelas mengenai barang inventaris kantor sebagai penunjang kegiatan dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini.

---

<sup>29</sup> Lihat, *Daftar Barang Inventaris Milik Negara*, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar tanggal 3 Januari 2002.

**Tabel 8**  
**Daftar Barang Inventaris Kantor BKSNT Denpasar Tahun 2004**

No.	Jenis Barang	Merk Type	Jlh.	Asal dari	Th. Dibili
1.	Mesin Tulis panjang	Royal	1 bh	Pemb. Rutin	1996
2.	Mesin Tulis	Brother	1 bh.	Pemb. Proyek	1998
3.	Mesin Tulis	Olympia	1 bh.	Pemb. Proyek	1998
4.	Computer	Wearners	5 set	DP/Rutin	1996/ 99/01
5.	Scanner	HP 6200C	1 set	Dana Pusat	1999
6.	Pengeras Suara	Toa	1 bh.	Pemb. Rutin	1996
7.	Faksimile	Panasonic	1 bh.	Dana pusat	1997
8.	Printer Epson	Epson 20 SX	1 bh.	Pemb. Rutin	2002
9.	Telepon/Intercome	Nitsuka	1/15 bh.	Pemb. Rutin	1997
10.	Kamera	Nicon	1 bh.	Pemb. Rutin	2001
11.	Bateray Camera Vidio	-	1 bh.	Pemb. Rutin	1998
12.	Slide Proyektor	-	3 bh.	Pemb. Rutin	2000/01
13.	Almari	-	16 bh.	Pemb. Rutin	1998/ 99/00/02
14.	Brankas	Galland	1 bh.	Pemb. Rutin	1997
15.	Filling Kabinet	Brother	3 bh.	Pemb. Rutin	1996/99
16.	Rak	-	3 bh.	Pemb. Rutin	1998
17.	AC/ Kipas Angin	Gold Star, LG, Nas	6 bh.	Pemb. Rutin	1998/ 99/02
18.	Tabung Pemadam	Yamato, Ecco	2 bh.	Pemb. Rutin	1997/98
19.	Rel Korden	-	76 M	Pemb. Rutin	1998
20.	Meja Kerja	-	29 bh.	Pemb. Rutin	97/98/ 00/01/02
21.	Podium	-	1 bh.	Pemb. Rutin	2002
22.	Kussi Jati alas rotan	-	105 bh.	Pemb. Rutin	96/98/99/ 00/01/02
23.	Meja Kursi Tamu	-	4 set	Pemb. Rutin	1998
24.	Lukisan Wayang	-	4 bh.	Pemb. Rutin	2002

25.	Seni Kerajinan	-	203 bh.	Pemb. Rutin	1997/ 98/99
26.	Seni Pahat	-	6 bh.	Pemb. Rutin	1997/98
27.	Seni ukir	-	7 bh.	Pemb. Rutin	1996/99
28.	Seni lukis	-	22 bh.	Pemb. Rutin	1997/ 98/00/01
29.	Papan Tulis WB	-	3 bh.	Pemb. Rutin	1997/98
30.	Handycome	-	1 bh.	Pemb. Rutin	2002
31.	Perpustakaan	-	268 bh.	Pemb. Rutin	97/98/99 /00/21/02
33.	Kijang Minibus	Shrt STD KF. 70	1 bh.	Pemb. Proyek	1997

Sumber: Daftar Inventaris Milik Negara (BKSNT Denpasar) Tahun 2004

### 3.5.4 Perpustakaan

Pembangunan di bidang pendidikan saat ini cukup menggembirakan. Sejak Pelita I sampai sekarang ikut berlomba dengan pembangunan-pembangunan di sektor lainnya. Dalam jajaran unit pelaksana dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, peranan Pusat Pembinaan Perpustakaan tidak pula kecil artinya turut memajukan bangsa dan negara. Khususnya di bidang perpustakaan demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang senang membaca dan belajar seumur hidupnya untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan produktivitas dalam pembangunan bangsa.

Dengan adanya perpustakaan-perpustakaan seperti Perpustakaan Wilayah di Ibu Kota Propinsi, Perpustakaan Umum Daerah Tingkat II yang berada di Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya, Perpustakaan Umum Kecamatan yang berada di Ibu Kota Kecamatan, Perpustakaan Desa, Perpustakaan Keliling, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus/Dinas, membuktikan bahwa jangkauan perpustakaan sudah semakin luas. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sistem nasional perpustakaan yang menyeluruh, mantap, terpadu dan berkesinambungan serta didukung oleh organisasi yang tertib berwibawa

dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Indonesia yang serasi, selaras dan seimbang.<sup>30</sup>

Perpustakaan yang ada di BKSNT Denpasar tergolong Perpustakaan Khusus/Dinas mempunyai tugas: (1) Memberikan layanan untuk masyarakat pemakai; (2) Untuk menyiapkan pengelolaan perpustakaan yang berkualitas; (3) Membuka kesempatan untuk berkonsultasi tentang segala aspek layanan dan penyelenggaraan perpustakaan. Disamping tugas, perpustakaan BKSNT Denpasar juga mempunyai fungsi: (1) Sebagai sarana pendidikan masyarakat; (2) Pusat layanan informasi; (3) Pusat melaksanakan riset/penelitian; (4) Sarana rekreasi/hiburan; (5) sebagai sarana pelestarian budaya bangsa.

Adapun tujuan dibentuknya perpustakaan adalah; (1) Untuk memupuk rasa cinta, kesadaran dan kebiasaan membaca; (2) Memperluas pengetahuan para pemakai; (3) Membantu mengembangkan kecakapan berbahasa dan daya pikir dengan menyediakan bahan-bahan bacaan; (4) Membimbing agar dapat menggunakan bahan pustaka yang baik, efektif dan efisien terutama dalam menggunakan bahan refrensi.

Untuk memenuhi tujuan, tugas dan fungsi perpustakaan seperti terurai diatas maka pada tanggal 10 Juli 2000 Balai Kajian Jarahnitra Denpasar memanggil pembina pustakawan dari Perpustakaan Wilayah Denpasar yang bertugas melaksanakan pembinaan tenaga ahli perpustakaan dan memberikan bimbingan tenaga teknis kepada pustakawan di BKSNT Denpasar. Pembinaan dilakukan selama satu minggu yang diikuti oleh Ni Luh Widasih, B.A., I Ketut Sudharma Putra, S.S., I Made Sedana, B. A., dan Anak Agung Gde Rai Gria, S.S. Adanya pembinaan pustakawan ini diharapkan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas instansi/lembaga di samping tersedianya perpustakaan yang berfungsi dalam suatu sistem nasional perpustakaan demi tercapainya suatu kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang biasa membaca, gemar belajar, cinta kepada perpustakaan sebagai sarana untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa.

Perpustakaan BKSNT Denpasar sampai saat ini telah memiliki koleksi buku-buku cukup banyak. Koleksi yang dimiliki ada yang diperoleh/sumbangan dari

---

<sup>1</sup> Drs. J. P. Kompas, M.A., Pusat Pembinaan Perpustakaan, dalam *Warta Budaya No. 4 th. IV*, (Jakarta: Proyek Media Kebudayaan Jakarta Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud, 1980/1981), p. 1.

berbagai instansi di seluruh Indonesia baik berupa buku-buku maupun majalah. Perpustakaan juga telah membeli berbagai buku-buku dari biaya rutin sejak tahun 1996 sampai sekarang. Untuk menambah pengetahuan maupun berita yang sedang berkembang Balai Kajian juga berlangganan dua buah surat kabar yakni Bali Post dan Harian Nusa. Berita-berita yang penting dan artikel-artikel yang dimuat dikliping sehingga bisa dimanfaatkan oleh para peneliti untuk menambah informasi yang dibutuhkan guna menunjang hasil penelitian. Kliping dikelompokkan berdasarkan temanya seperti masalah politik, kesejarahan, nilai tradisional dan budaya, serta tradisi kepercayaan.

Buku-buku yang diperoleh dari berbagai instansi di seluruh Indonesia sejak tahun 1996 sampai tanggal 15 Juli 1998 ada sebanyak 996 buah judul dengan 2.158 eksemplar. Sumbangan buku dari tanggal 9 Januari 1999 sampai tanggal 19 Maret 2004 ada sebanyak 251 judul buku, yang terdiri dari 793 buah eksemplar. Majalah yang diperoleh berupa sumbangan sejak tanggal 15 Nopember 1996 sampai tanggal 3 Mei 1999 berjumlah 34 dengan 53 buah exemplar. Sedangkan buku-buku yang dibeli dengan menggunakan dana rutin sejak tahun 1996 sampai tahun 2004 ada sebanyak 214 buah judul, yang terdiri dari 255 buah exemplar. Jadi jumlah seluruh buku yang tercatat sebanyak 1.495 judul dengan jumlah 3.259 eksemplar. Namun masih banyak buku-buku yang sampai saat ini belum dimasukkan ke dalam buku registrasi/pencatatan. Untuk lebih jelas mengenai pengadaan/pembelian buku-buku dari tahun 1996 – 2004 dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini.

**Tabel 9**  
**Pengadaan/Pembelian Buku-buku dengan Dana Rutin**  
**dari Tahun 1996 – 2004**

Nomor	Tahun	Jmlh. Eks.
1.	1996	2
2.	1997	43
3.	1998	18
4.	1999	12
5.	2000	44
6.	2001	46
7.	2002	32
8.	2003	7
9.	2004	20
<b>Jumlah</b>		<b>255</b>



Selain koleksi yang diperoleh dari sumbangan dan pengadaan/pembelian, perpustakaan BKSNT Denpasar juga memiliki koleksi dari hasil-hasil penelitian dan artikel yang dimuat dalam Majalah Jnana Budaya oleh staf peneliti dari Kelompok Pengkajian Sejarah, Kelompok Pengkajian Tradisi, Kelompok Pengkajian Kepercayaan dan Kelompok Pengkajian Lingkungan. Hasil-hasil penelitian tersebut berjumlah kurang lebih 126 judul dari daerah Propinsi Bali, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Propinsi Nusa Tenggara Timur. Ketiga tempat ini merupakan wilayah kerja BKSNT Denpasar.

## **BAB IV**

### **SEWINDU BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL DENPASAR TAHUN 1996-2004**

#### **4.1 Hasil Karya yang telah dicapai**

##### ***a. Hasil Kajian Rutin***

1. Potensi Desa Adat dalam Perkembangan Pariwisata Budaya di Desa Batu bulan
2. Kajian Nilai Budaya Naskah Kuno Wrti Sasana
3. Inventarisasi dan Dokumentasi Monumen Perjuangan di Daerah Bali
4. Peranan Anak dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Sukawati Gianyar
5. Sistem Pelestarian Lingkungan Alam pada Jaman Bali Kuno (Rekaman Beberapa Prasasti).
6. Kajian Naskah Kuno Darma Sawita.
7. Dukun dan Teknik Pengobatan Tradisional pada Masyarakat di Kabupaten Badung.
8. Pendataan Arti Simbol Upacara Perkawinan di Bali.
9. Fungsi Kelompok Sosial pada Masyarakat Heterogen di Komplek Perumahan Nasional Monang-Maning Denpasar.
10. Kajian Nilai Adiparwa
11. Alih Bahasa dan Kajian Kumpulan Adat Recht Bundel Bali-Lombok Distrik Tejakula di Bali Utara.
12. Pemetaan Kesejarahan (Kabupaten Jembrana, Buleleng, Klungkung, Bangli, Karangasem).
13. Pemetaan Kesejarahan ( Kabupaten Gianyar, Tabanan, Badung, Kodya Denpasar).
14. Teknik Penulisan Laporan
15. Buadaya Masyarakat Perbatasan (Studi Kasus Desa Pegayaman Buleleng).
16. Sejarah Balai Kajian Jarahnitra Denpasar

17. Sistem Perekonomian pada Masa Bali Kuno (Catatan dalam Beberapa Prasasti).
18. Peta Monumen Perjuangan Daerah Bali.
19. Pola Pemukiman Penduduk Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.
20. Variasi Makanan Tradisional Kabupaten Badung.
21. Biografi I Gusti Ayu Rapeg.
22. Penanaman Nilai Budaya Melalui Tradisi Mesatua Bali pada Anak-Anak Pedesaan di Bali.
23. Upacara Tradisional Ngusaba Dodol di Desa Selat, Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem.
24. Pergeseran Lahan Pertanian Menjadi Lahan Pemukiman di Desa Dalung, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
25. Kajian Nilai-Nilai Budaya Upacara Ngeruat di Kabupaten Badung.
26. Sistem Kesatuan Hidup Setempat di Desa Belok Sidan Kabupaten Badung.
27. Dampak Pariwisata terhadap Kehidupan Sosial Budaya di Desa Tenganan Pegringsingan.
28. Upacara Tradisional Mekekobok di Desa Tenganan Dauh Tukad.
29. Riwayat Perjuangan Mayor Wisnu.
30. Kajian Nilai Cerita Rakyat Bali.
31. Poses Kembalinya Negara Indonesia Timur ke Negara Kesatuan Republik Indonesia ( Bali Tahun 1949-150).
32. Sistem Kesatuan Hidup Setempat di Desa Sada, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
33. Nilai dan Teknik Pembuatan Keris di Kabupaten Tabanan.
34. Nilai-Nilai Budaya yang terkandung di dalam Upacara Panca Bali Krama.
35. Upacara Odalan di Merajan Sebagai Wahana Sosialisasi Kehidupan Beragama.
36. Kajian Lontar Lulut.
37. Kajian Mitos dan Tabu Cerita Rakyat Jagul Tua.
38. Peranan Pura Luhur Uluwatu (Perspektif Sosial Budaya).

39. Dampak Pergeseran Fungsi Tanah pada Organisasi Subak di Kabupaten Badung dan Kodya Denpasar.
40. Arti dan Fungsi Ari-Ari dalam kaitan dengan Pelestarian Lingkungan di Desa Badung Gede.
41. Butir-Butir Tercecer dalam Agama Hindu.
42. Alih Aksara dan Alih Bahasa Naskah Pangraksa Jiwa.
43. Nilai Budaya dan Fungsi Upacara Pesta Ponan di Desa Poto Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
44. Gerakan Bawah Tanah dengan Semangat Anti Jepang di Bali Tahun 1942-1943.
45. Kajian Arti Simbol Mas Kawin pada Upacara Perkawinan di Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.
46. Fungsi Upacara Bukakak Hubungannya dengan Hasil Panen di Sangsit Buleleng.
47. Puri Kerambitan sebagai Penunjang Pariwisata Desa Kerambitan, Kabupaten Tabanan.
48. Synkritisme Agama Hindu dan Islam pada Masyarakat Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
49. Survey Desa Wisata (Studi Kasus di Desa Beraban Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan).
50. Tradisi Magibung di Desa Duda Timur Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem.
51. Makna Hiasan (Lukisan) pada Wadah atau Bade di Daerah Bali.
52. Upacara Daur Hidup sebagai Penerus Nilai Budaya (Kasus Desa Batu bulan).
53. Kajian Nilai Ceritera Ni Dyah Tantri.
54. Kajian Usada Bali, Cara Mengatasi Stress.
55. Fungsi dan Makna Ngelawang di Bali.
56. Keberadaan Angkutan Dokar sebagai Pendukung Pariwisata di Kotamadya Denpasar.
57. Perubahan Penataan Pemukiman di Sepanjang Sungai Badung Dalam Rangka Wisata Kota.
58. Kajian Upacara Med-Medan di Desa Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kotamadya Denpasar.

59. Biografi Tokoh Pejuang I Nyoman Mantik.
60. Upacara Ngaro (Sedekah Laut) di Desa Serangan.
61. Kerajaan Gianyar di Bawah Dewa Manggis VI.
62. Fungsi dan Makna Upacara Ngusaba di Subak Medewi.
63. Pendudukan Pasukan Jepang di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur Tahun 1942-1945.
64. Ceritera Rakyat Bali/Satua Bali sebagai Wahana Memantapkan Budaya Spiritual Masyarakat (Gianyar, Badung, Denpasar).
65. Petani Gula Aren ( Studi Kasus di Desa Dawan Kaja, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung).
66. Profil Kerukunan Umat Beragama di Desa Antiga, Badung.
67. Pengaruh Permainan Modern Terhadap Permainan Tradisional di Kalangan Anak-Anak di Daerah Bali (Badung, Denpasar, Buleleng).
68. Makna Upacara Tumpek Uduh/Tumpek Wariga, Tumpek Bubuh Bagi Masyarakat Bali.
69. Pawang Hujan (Tukang Terang) dalam Kehidupan Masyarakat Kabupaten Karangasem.
70. Mitos Rumah Tradisional Masyarakat Sida Tapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
71. Makna Upacara Ngenteg Linggih Bagi Masyarakat Hindu Bali.
72. Kajian Ajaran Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Daerah Bali (Lokasi Buleleng).
73. Obyek Wisata Sejarah di Bali (Lokasi Kabupaten Jembrana).
74. Pemanfaatan Lahan Kritis Tebing Sungai Ayung di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.
75. Kesatuan Hidup Stempat di Pekat, Kecamatan Sumbawa Nusa Tenggara Barat.
76. Potensi Populasi Burung Kokokan sebagai Daya Tarik Pariwisata di Dea Petulu, Gianyar.
77. Upacara Pamarisudha Karipubhaya di Kuta, Bali.

**b. Hasil Kajian Proyek/Pembangunan**

1. Potensi Kendala dan Dinamika Nilai-Nilai Budaya Daerah Masyarakat Timor-Timur Bagi Pemantapan Integrasi Bangsa.
2. Integrasi Antar Etnik Berbeda Agama Melalui Agama (Kajian Tentang Hubungan Antar Etnik Bali dan Sasak Melalui Upacara Perang Topat di Pura Lingsar Lombok Barat).
3. Peranan Nilai Budaya Daerah Bali dalam Gerakan Disiplin Nasional.
4. Pengetahuan, Sikap, Keyakinan dan Perilaku Generasi Muda terhadap Tatakrama Tradisional di Denpasar.
5. Pengetahuan, Sikap, Keyakinan dan Perilaku Generasi Muda Berkenaan dengan Upacara Perkawinan Tradisional di Mataram.
6. Pengetahuan, Sikap, Keyakinan dan Perilaku Generasi Muda Berkenaan dengan Pembagian Waris Daerah Bali.
7. Tatakrama Suku Bangsa Loloan di Kabupaten Jembrana Propinsi Bali.
8. Budaya Asli Suku Bangsa Bali Aga di Tenganan Pegriingsingan.
9. Tatakrama di Desa Kepaon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar.
10. Budaya Suku Bangsa Masyarakat Bali Aga (Desa Sembiran ) di Kabupaten Buleleng Propinsi Bali.
11. Fungsi Keluarga Suku Bangsa Atoni/Dawan Kupang dalam menanamkan Nilai Budaya.
12. Struktur Masyarakat Kerajaan Manggarai di Flores Barat.
13. Budaya Masyarakat Suku Bangsa Atoni/Dawan di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
14. Runtuhnya Kerajaan Sanggar di Sumbawa.
15. Konsepsi Kepercayaan Dalam Kaitannya dengan aktivitas Upacara Pertanian pada Masyarakat Sasak di Desa Bayan, Lombok Barat.
16. Jenis-Jenis dan Fungsi Pemangku Adat Dalam Usaha Memahami Struktur Masyarakat Bayan di Lombok Barat.
17. Biografi Budayawan dan Sastrawan I Wayan Turun dari Desa Kesiman, Denpasar Timur.

18. Perubahan Sistem Penguasaan Tanah dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.
19. Seni Sebagai Agrobisnis Wisata dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat di Desa Ubud, Gianyar.
20. Peran Obyek Wisata Sebagai Sumber Informasi Budaya di Kabupaten Gianyar, Badung dan Kodya Denpasar.
21. Kajian Sistem Teknologi Tradisional pada Pranata Sosial Masyarakat Selat- Karangasem.
22. Pembentukan Tentara PETA tahun 1944 Kaitannya dengan Nasionalisme di Bali.
23. Peranan Parindra Bali dalam Perjuangan Politik Melawan Pemerintah Belanda di Bali.
24. Konsep Mitos berdirinya Puri Mengwi dan Pura Taman Ayun di Kabupaten Badung.
25. Upacara Wana Krtih Kaitannya dengan Pelestarian Lingkungan di Bali.
26. Makna Upacara Guru Piduka pada Masyarakat Daerah Bali.
27. Pemukiman Kampung Bugis di Pulau Serangan Denpasar Hubungannya dengan Puri Pemecutan Denpasar.
28. Sistem Pemerintahan Suku Bangsa Baliaga di Desa Timbrah Kabupaten Karangasem Propinsi Bali.
29. Upacara Daur Hidup Satu Oton, sampai Akil Baligh (sebuah Kajian Nilai Budaya).
30. Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat dan Kebudayaan Bali.
31. Potensi dan Pengembangan Wisata Alam Obyek Wisata Danau Kelimutu, Desa Koanara, Kecamatan Wolo Waru, Kabupaten Ende Propinsi Nusa Tenggara Timur.
32. Penyusunan Ensiklopedi Makanan Tradisional Daerah Nusa Tenggara Timur.
33. Inventarisasi Sumber Sejarah Nusa Tenggara Timur.
34. Perlawanan Rakyat di Pulau Sumbawa Terhadap Belanda Tahun 1906-1909.
35. Tatakrama Suku Bangsa Samawa di Sumbawa.
36. Inventarisasi Kepercayaan di Propinsi Bali.

**c. Hasil Kajian Kerjasama**

1. Sistem Kesatuan Hidup Setempat Desa Marginal Belok Sidan Kecamatan Petang, Kabupaten Badung dalam rangka Pengembangan Agrowisata dan Agrobisnis, Kerjasama dengan Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2000.
2. Penelitian dan Pendataan tentang Keluarga Miskin/Pra KS di Kabupaten Badung, Kerjasama dengan Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2001.
3. Pengkajian Purana Pura Sad Kahyangan Pucak Mangu Kerjasama dengan Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2002.
4. Penyusunan Ensiklopedi Kepercayaan Masyarakat Bali Kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta Tahun 2002.
5. Dampak Ekonomi, Sosial dan Budaya Tragedi Peledakan Bom Bali Terhadap Masyarakat Kuta dan Sekitarnya, Kerjasama dengan Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata serta Program Pendidikan Doktor (S3) Kajian Budaya Universitas Udayana Tahun 2003.
6. Penulisan tentang Tonggak-Tonggak Sejarah Pada Masa Revolusi Fisik di Bali 1946-1948, Kerjasama dengan Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) Propinsi Bali Tahun 2003.

**4.2 Kegiatan Yang Dilaksanakan**

**a. Pertemuan Ilmiah**

1. Diskusi dan Sosialisasi program kerja Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar Tahun Anggaran 1996/1997.
2. Seminar Nilai Tradisional dalam rangka Pemantapan Program Kerja Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Tahun 1996/1997.
3. Ceramah Agama tentang Kajian Nilai-Nilai Budaya Daerah Bali yang bersumber pada Ajaran Agama Hindu (Doa Sehari-hari) Tahun Anggaran 1996/1997.
4. Seminar Nasional Kesejarahan dan Nilai Tradisional dengan Tema "Meneruskan Nilai Kepahlawanan Dalam Rangka Memantapkan Wawasan Kebangsaan" Tahun Anggaran 1997/1998.



5. Dialog Budaya bekerja sama dengan Radio Menara tahu Anggaran 1997/1998.
6. Dialog Program Kerja dengan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta dalam rangka Studi Banding.
7. Diskusi Proposal Antar Kelompok Kajian Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar tahun Anggaran 1998/1999.
8. Dialog Budaya Tahun 1998, tanggal 26 Desember 1998 di Aula Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar Tahun Anggaran 1998/1999.
9. Sarasehan “Tantri “ Dalam rangka Pesta Kesenian Bali ke XXI Tahun 1999 tanggal 10 Juli 1999, bekerja sama dengan Taman Budaya dan Dinas Kebudayaan Propinsi Bali.
10. Diskusi Proposal dan Evaluasi Hasil Penelitian antar Kelompok Balai Kajian Jarahnitra Denpasar Tahun Anggaran 2000.
11. Sarasehan “Babad” Dalam rangka Pesta Kesenian Bali ke XXII Tahun 2000 tanggal 1 Juli 2000, bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Propinsi Bali.
12. Diskusi/Bedah Proposal Penelitian Rutin Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar Tahun Anggaran 2001.
13. Sarasehan “Rwa Bhineda” Dalam rangka Pesta Kesenian Bali ke XXIII Tahun 2001, bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Bali.
14. Penataran Pinandhita dan Tukang Banten se-Desa Batu Bulan, Kerjasama Dengan STAHN Denpasar dan Desa Batu Bulan Tahun Anggaran 2001.
15. Bimbingan Teknis Penelitian Rutin Tahun 2002.
16. Dialog “Peranan Keluarga Dalam Pengembangan Kebudayaan” tanggal 28 Juni 2002. Kerjasama dengan Direktorat Tradisi dan Kepercayaan, Jakarta Tahun 2002.
17. Sarasehan “Jagadhita Sarwa Prani Hita “ (Keseimbangan alam beserta isinya) Dalam rangka Pesta Kesenian Bali ke XXIV Tahun 2002, kerjasama dengan Dinas Kebudayaan Pripinsi Bali.
18. Seminar Hasil Penelitian Rutin Tahun 2002/ Evaluasi Hasil Kajian Rutin Tahun 2002 BKSNT Denpasar.

19. Diskusi “ Integrasi Bangsa Dalam Persepektif Sejarah” di Propinsi Bali, NTB dan NTT. Dana Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2002 Kerjasama dengan MSI Cabang Bali.
20. Temu Tokoh Sejarah di Lombok, Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2002.
21. Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan di Propinsi Bali, NTB dan NTT Tahun Anggaran 2002.
22. Lawatan Sejarah dan Diskusi Kesejarahan di Tanah Aron Kabupaten Karangasem, Tahun Anggaran 2002.
23. Sarasehan dalam rangka Pesta Kesenian Bali ke XXV Tahun 2003, Kerjasama dengan Dinas Kebudayaan Propinsi Bali dan Fakultas Sastra Universitas Udayana.
24. Lawatan Sejarah dan Diskusi Kesejarahan Sumbawa-Bima, di Istana Kesultanan Bima (Asi Mbojo) Bima-Nusa Tenggara Barat Tahun 2003.
25. Sosialisasi Nilai Budaya Dalam Keluarga, tanggal 24 Juni 2004 Kerjasama dengan Kementerian Budpar Jakarta Tahun 2004.
26. Sarasehan “ Sabda Alam : Kidung Keindahan dan Kedamaian dalam Kebhinekaan” dalam rangka Pesta Kesenian Bali ke XXVI Tahun 2004, bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Propinsi Bali dan Fakultas Sastra Universitas Udayana.

**b. Lomba**

1. Lomba Melukis tentang Peranan Nilai-Nilai Kesejarahan yang Terbaku dalam Seni Lukis tahun 1997.
2. Lomba Berpidato Dalam Bahasa Bali Tahun 1997.
3. Lomba Dharma Wacana untuk Siswa SLTP se-Bali Tanggal 12 Juli 1999.
4. Lomba Masatua Bali untuk Siswa SD se-Bali Tanggal 12 Juli 1999.
5. Lomba Menulis Bali ke Dalam Lontar untuk Masyarakat Umum se-Bali tanggal 12 Juli 1999.
6. Lomba Ceritera Bergambar untuk Guru-Guru se-Bali Tahun 1999.
7. Lomba Utsawa Dharma Gita dengan peserta Masyarakat Umum lokasi di Desa Batubulan Tahun 2000.

8. Lomba Ceritera Bergambar peserta Guru-Guru SMU di Kabupaten Badung, Kodya Denpasar dan Gianyar, tahun 2000.
9. Lomba Penulisan Pahlawan Wanita Bali untuk Umum Tahun 2002.
10. Lomba Peragaan Tradisi Lisan untuk umum Tahun 2002.
11. Lomba Permainan Tradisional *dagongan*, *egrang trumpah panjang*. Diikuti oleh Siswa SMU dan SMK se-Bali. Tahun Anggaran 2002.
12. Sayembara Mengarang Kesejarahan untuk Siswa SMU, SMK sederajat se-Bali, NTB dan NTT. Tahun Anggaran 2002.
13. Sayembara Membuat Foto Obyek Sejarah peserta Siswa SMU, SMK sederajat se-Bali, NTB dan NTT tahun anggaran 2002.
14. Lomba Mengulas Peristiwa Sejarah dari Surat Kabar Sejaman pesertanya siswa SMU, SMK sederajat se-Bali, NTB dan NTT tahun Anggaran 2002.

### 4.3 Perencanaan

#### 4.3.1 Visi dan Misi

##### a. Visi

Berdasarkan Tupoksi yang dimiliki Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar maka visi sebagai gambaran yang ideal masa depan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar dapat dirumuskan sebagai berikut: *“Mewujudkan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar sebagai lembaga dengan kompetensi andal di bidang pengkajian dan informasi kebudayaan dalam kerangka pembangunan berwawasan budaya dengan fokus kesejarahan dan nilai tradisional serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”*.

Penjelasan :

1. Aspek Kebudayaan adalah bidang cakupan yang sangat luas. Bahkan Balai Kajian menempatkan prosesi budaya sebagai dasar pijakan dalam rangka pembangunan yang berwawasan budaya.

Kebudayaan merupakan segala hal yang dimiliki oleh manusia dimulai dari pikiran, perilaku manusia secara fungsional dan disfungsional yang ditata dalam masyarakatnya. Oleh karena cakupannya sangat luas, maka Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang kebudayaan akan membatasi pengkajiannya pada bidang sejarah dan Nilai tradisional serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Untuk mendapatkan out put hasil kajian yang berkualitas dan sesuai dengan harapan keilmuan dan masyarakat, maka pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompetensi andal merupakan skala prioritas. Visi pembentukan SDM yang berkompetensi andal tersebut bersifat logis dan realitas, karena dalam upaya pencapaiannya sudah ada beberapa dukungan sebagai berikut :
  - 1) adanya dukungan pimpinan
  - 2) adanya peluang jabatan fungsional
  - 3) adanya motivasi tenaga fungsional peneliti meningkatkan kemampuan
  - 4) adanya program kegiatan bimbingan teknis
  - 5) adanya dukungan dari instansi terkait
  - 6) tersedianya hasil penelitian multidisipliner
  - 7) banyaknya fenomena kesejarahan dan kenilaitradisional yang perlu diteliti

**b. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar memiliki misi sebagai berikut :

1. mengembangkan kajian sejarah dan nilai tradisional serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Esa secara multidisipliner dan berkelanjutan.
2. Balai Kajian sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di bidang kebudayaan, menempatkan sector budaya sebagai dasar pijakan dalam penyusunan dan penerapan program.
3. menerapkan hasil kajian dalam mendukung pengembangan kebudayaan, pariwisata dan pendidikan.

4. menumbuhkembangkan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar sebagai sumber informasi kebudayaan suku bangsa yang berada di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
5. menumbuhkembangkan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar secara harmonis dalam konteks lokal dan nasional.

#### Penjelasan

1. Jenis pendidikan S1 yang dimiliki pegawai BKSNT Denpasar cukup beragam. Walaupun keragaman tersebut masih sebatas tergolong ilmu-ilmu sosial dan budaya, akan tetapi tidak semua ilmu-ilmu sosial dan budaya itu dipergunakan untuk kegiatan pengkajian dan penelitian bidang sejarah dan nilai tradisional serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dasar-dasar pendidikan yang dimiliki saat ini yaitu: Antropologi, Sejarah, Sastra Indonesia, Geografi, Sastra Daerah, Hukum, Administrasi Negara, Komunikasi. Untuk menyamakan persepsi dalam kegiatan penelitian perlu ada program kegiatan Bimbingan Tehnis Penelitian, sebab setiap disiplin ilmu biasanya memiliki dasar-dasar metodologi penelitian yang berbeda.
2. Sementara ini, hasil penelitian yang ada di BKSNT Denpasar hanya milik kantor dan instansi-instansi terkait. Bahkan tidak jarang pula hasil penelitian hanya menjadi milik si penelitinya sendiri. Padahal hasil penelitian seperti sejarah dan nilai tradisional seharusnya dikembalikan ke masyarakat pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Sikap tidak mengembalikan hasil penelitian ke masyarakat termasuk sikap ikut mematikan kebudayaan yang bersangkutan. Sikap seperti itu harus segera diubah. Lebih-lebih terhadap dunia pariwisata. Sebab kebudayaan merupakan rohnya pariwisata. Demikian pula sumbangannya terhadap dunia pendidikan merupakan media yang paling tepat untuk mensosialisasikan nilai-nilai budaya dan kesejarahan.

3. Mensosialisasikan dan melayani masyarakat merupakan salah satu tupoksi dari BKSNT. Untuk hal ini BKSNT akan meningkatkan jumlah oplah cetakannya dari setiap hasil penelitian. Disamping meningkatkan jumlah oplah cetakan, namun juga kualitas kemasannya juga akan ditingkatkan, bentuk penyajiannya juga diragamkan seperti melalui pandang dengar (radio dan televisi).
4. BKSNT Denpasar sudah menyadari bahwa materi program kebudayaan baik rutin maupun pembangunan selama ini difokuskan pada kebudayaan lokal yang dimiliki oleh suku bangsa yang berada di wilayah Bali, NTB dan NTT. Demikian pula materi sejarah dan aspek kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kebudayaan lokal, sejarah dan aspek penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan hanya sebagai aset daerah, melainkan juga aset nasional, terutama dalam rangka untuk mencegah disintegrasi bangsa. Maka pelestarian kebhinekaan budaya tetap menjadi skala prioritas, karena dari kebhinekaan diharapkan untuk menopang ketunggalikaan budaya nasional.

#### **4.3.2 Strategi yang Ditempuh**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan harapan, maka perlu ada strategi kebijaksanaan. Adapun strategi kebijaksanaannya sebagai berikut :

1. Eksistensi Kelembagaan  
Mensosialisasikan Balai Kajian terutama kepada instansi terkait di tiga wilayah kerja yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui program :
  - Bimbingan teknis penelitian
  - Diklat Teknis berjenjang (tingkat dasar, lanjutan dan ahli)
  - Menempuh program Pasca Sarjana/S2
  - Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

- Kerjasama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) dan Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI).
3. Menyeimbangkan wawasan teoritis dan implemented (keterbukaan)  
Walaupun lembaga Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional lebih banyak menangani kebudayaan yang bersifat intangible dan abstrak, sehingga pemahaman konsep, teori dan kerangka berpikir menjadi prioritas utama. Akan tetapi harus mampu pula dari hasil kajian tersebut untuk dijadikan bahan dalam menyusun kebijakan kebudayaan, bukan hanya untuk Balai Kajian sendiri, tetapi juga mampu dioperasionalkan oleh instansi lain yang memerlukan.
  4. Networking Kelembagaan  
Orientasi ke depan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar harus mampu menjalin kerjasama dengan instansi-instansi di luar jalur vertikal (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata). Seperti Dinas-Dinas terkait yang ada di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota. Agar bisa diterima oleh instansi di luar jalur vertikal, maka seluruh pegawai yang ada di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar harus profesional dalam kegiatan penelitian.

#### **4.3.3 Sarana dan Prasarana ke Depan**

Untuk mencapai segala keinginan dan cita-cita di atas, maka harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Mulai dari gedung perkantoran representatif (tempat kerja), sarana penunjang teknis fungsional yang harus lengkap (komputer, tustel, tape recorder, handycam dan lain-lain), sarana dokumentasi dan publikasi (laboratorium) dan sebagainya.

#### **4.3.4 Rencana Strategis**

Untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsi Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar dalam rangka menghadapi reformasi di segala bidang kehidupan sesuai dengan wilayah kajian yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Maka dipandang perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk mewujudkan Balai Kajian sebagai lembaga berkompetensi di bidang kajian dan informasi kebudayaan dengan fokus kesejarahan dan nilai tradisional serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa. Rencana Strategis selama lima tahun tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Balai Kajian Nomor : 244/SK/BKSNT/9.IX/02), yang didalamnya termasuk Visi dan Misi Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Untuk lebih jelasnya baca : *Rencana Strategis Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar Tahun 2003-2008*.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Mewujudkan cita-cita dan harapan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, adalah dengan cara terus menerus melaksanakan pembangunan di berbagai sektor kehidupan. Salah satu dampak dari suatu pembangunan adalah terjadinya perubahan sosial dan budaya. Perubahan tersebut akan menyebabkan bergesernya sebuah nilai tata kehidupan masyarakat berupa tradisi dan perubahan pemahaman akan sejarah yang telah ada.

Di masa reformasi ini, diharapkan adanya banyak perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan kesejahteraan sosial yang semakin merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, harapan itu belum juga menjadi kenyataan, kehidupan masyarakat bangsa masih dihadapkan berbagai masalah sosial-ekonomi dan ancaman disintegrasi bangsa. Permasalahan ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan bangsa akibat krisis sejak tahun 1997 yang sampai saat ini masih belum diselesaikan secara tuntas. Akibat dari krisis tersebut dapat diformulasikan ada beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh bangsa ini, yakni : (1) munculnya gejala disintegrasi bangsa dan merebaknya konflik sosial; (2) lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia; (3) lambatnya pemulihan ekonomi; (4) rendahnya kesejahteraan masyarakat; (5) meningkatnya penyakit sosial dan lemahnya ketahanan budaya nasional; (6) kurang berkembangnya potensi pembangan daerah dan masyarakat. Persoalan bangsa yang sangat kompleks ini lebih banyak dilihat orang dari sudut politik, ekonomi dan hukum dengan mengabaikan pendekatan budaya. Pendekatan kebudayaan dianggap terlalu konseptis dan tidak mampu memberikan jawaban yang nyata bagi persoalan aktual.

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional mempunyai tugas untuk menjawab semua tantangan di atas dengan mengambil porsi sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu di bidang kebudayaan khususnya kesejarahan dan kenilaitradisional. Perlu dipahami pula bahwa kebudayaan yang ada dalam masyarakat mengandung nilai dan konsep tentang kehidupan di alam semesta ini sesuai dengan perubahan dan dinamika masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu kebudayaan yang sarat dengan nilai-nilai tersebut perlu dikaji secara terus menerus dan dilestarikan agar generasi berikutnya dapat mewarisi. Dengan mewarisi nilai-nilai budaya dan mempunyai ketahanan budaya maka persoalan

demikian persoalan akan dapat diselesaikan. Di era globalisasi ini perlu suatu ketahanan budaya yang dapat membentengi masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita.

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar sebagai wadah atau lembaga yang khusus mengenai pengkajian di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memaksimalkan perannya untuk menghadapi perubahan di berbagai bidang sesuai dengan wilayah kerjanya. Dengan berbagai keterbatasan dan fasilitas yang ada berusaha melaksanakan tugas tersebut dengan sungguh-sungguh disertai dengan visi dan misi untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan khususnya di bidang sejarah dan nilai tradisional dengan memperhatikan arah dan tujuan yang telah digariskan.

Dengan berpedoman pada peraturan dan rencana strategis yang telah digariskan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional yang telah berusia sewindu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di wilayah kerjanya yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dibekali pula rasa tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi para karyawannya serta profesionalisme berusaha untuk menjawab berbagai tantangan yang ada. Dukungan dan kerjasama senantiasa diharapkan dari berbagai pihak dalam melaksanakan tugas tersebut.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari banyak suku bangsa serta aneka ragam budaya yang perlu dilestarikan, dikembangkan dan dikaji secara mendalam dan meluas guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar diharapkan mampu melaksanakan tugas melestarikan, mengembangkan, mengkaji dan menyebarkan keanekaragaman budaya kepada masyarakat sehingga meningkatkan pemahaman kebudayaan.

Pemahaman terhadap keanekaragaman kebudayaan tersebut perlu karena akan melahirkan suatu ingatan kolektif bangsadan simpul-simpul sejarah bangsa di masa lalu yang akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, keberadaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar di Bali dan balai-balai lainnya di Indonesia mampu memberikan peran tersebut sesuai dengan wilayah kerja masing-masing yang pada akhirnya bisa mempersatukan cita-cita bangsa dan memperkuat bangsa kita tercinta Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

*Badan Pertanahan Nasional, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 19 Mei 1997, AJ. 021697 22.03.04.01.4.00002.*

*Badan Pertanahan Nasional, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 19 Mei 1997, AJ. 021698 22.03.04.01.4.00003.*

*Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor: 14/BKSNT/C.28/2002.*

*Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.52/OT.001/MKP/2003.*

*Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 001/O/1998. Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKSNT.*

*Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 54705/A2.I.2/KP/1996 tanggal 2 Oktober 1996. Tentang Pengangkatan Kepala BKSNT Denpasar.*

*Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0303/O/1995 tanggal 4 Oktober 1995.*

*Surat Nomor: 44/SB/BKSNT/9.III/2004, perihal usulan untuk memperoleh Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya.*

*Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 0665/FI.II/CI. 1996 tanggal 24 Juni 1996.*

*Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 2636/FI.2/CI.1996 tanggal 5 Nopember 1996.*

*Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: KP. 103/III/14/BP-BUDPAR/2002.*

*Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 20973/SPAMA/LAN/2002.*

*Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 795/ADUM/LAN/1999.*

### Buku

BKSNT Denpasar. "Renstra BKSNT Denpasar Tahun 2002 – 2007 (Keputusan Kepala No. 244/SK/BKSNT/9.IX/2002". Denpasar: Naskah belum diterbitkan, 2002.

- Budhi Santosa, “Kemajemukan Masyarakat dan Keanekaragaman Kebudayaan Dalam Pembangunan Bangsa”. *Jnana Budaya* No.05/V/2001.
- I Gde Parimartha. 2002. *Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815-1915*. Jakarta : Djambatan.
- Kebijakan Teknis Operasional Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Kompas, M. P. Pusat Pembinaan Perpustakaan. Dalam *Warta Budaya* No. 4 th. IV. Jakarta: Proyek Media Kebudayaan Jakarta Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud, 1980/1981.
- Naingolan, H. 1998. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: tanpa penerbit.
- Setiawati, Elies, (dkk.). 1998. “Sejarah Berdirinya Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar”. Denpasar: BKSNT Denpasar.
- Shabri A, dkk., 2003. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh (Lahir Tumbuh dan Berkembang). Banda Aceh : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.
- Sudiman. 1999. *Kepegawaian Edisi Kedua*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Swarsi, S. 2002. “Memori Akhir Jabatan (1996 – 2002)”. Denpasar: BKSNT Denpasar
- Zulyani Hidayah. 1977. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta : LP3ES.
- , “Keberagaman Budaya sebagai Pemersatu Bangsa” artikel pada *Majalah Ragam Budaya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Tahun ke I*, 2001.

## Lampiran Foto



*Pembangunan gedung BKSNT masih dalam pengerjaan  
(atas) dan tampak depan bangunan gedung BKSNT  
setelah selesai (bawah)*





*Pemelaspan gedung BKSNT Denpasar*



*Penandatanganan prasasti oleh Mendikbud RI Bapak Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro pada tanggal 7 November 1996*



*Ibu Dra. S. Swarsi menandatangani Berita Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai Kepala Balai Kajian Jarahnitra Denpasar yang definitif pada tanggal 12 November 1996.*



*Drs. I Made Purna dilantik sebagai Ksubbag TU Balai  
Kajian Jarahnitra 5 November 1996*



*Sinkronisasi dan kordinasi Balai Kajian seluruh  
Indonesia pada tanggal 13 – 16 Oktober 1998 di Kuta,  
Bali.*



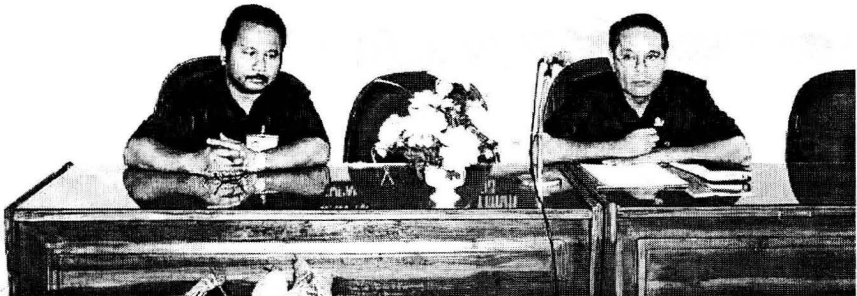


*Bapak Anhar Gonggong Direktur Jarahnitra sedang memukul gong tanda pembukaan Seminar Tanti pada tanggal 10 Juli 1999 di Denpasar rangkaian Pesta Kesenian Bali*



*Temu Budaya Daerah NTB yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2002*

DIALOG KEBUDAYAAN DAERAH  
REVITALISASI KEARIFAN LOKAL  
BERBASIS OTONOMI DAERAH DAN WAWASAN KEBANGSAAN  
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR  
KUPANG SEPTEMBER 2003



*Bapak Drs. Johanse Manulaga (Kadis Dikbud NTT)  
bersama Kasubdin Kebudayaan NTT pada pembukaan  
Dialog Budaya*



*Drs. I Made Purna (paling depan) dilantik sebagai Kepala Balai Jarahnitra Denpasar pada tanggal 1 Februari oleh Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan (Dr. I Gusti Ngurah Anom)*

Perpustakaan  
Jendera